

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF

Edisi Maret III Tahun 2021 No. 11

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Mahfudz Abdurrahman, S.Sos*

*Jelang Ramadhan*

***Jangan Bebani  
Rakyat Kenaikan  
Harga***



# Impor... Impor... Impor... Bukti Produksi Gempor

Sepanjang tulang punggung pemenuhan kebutuhan bersimpuh dari impor, maka sepanjang itu pula nilai produksi dalam negeri akan terpuruk. akan terus membungkuk dihadapan kepentingan pragmatis.



Cara menyelesaikan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sejatinya hanya dengan meningkatkan produksi atau melakukan importasi. Produksi berpijak pada sumbu hulu, sedangkan importasi di rentang hilir. Karena produksi yang tidak banyak, maka untuk menutupi permintaan maka diperlukan impor. Tidak masalah sepanjang masih terukur, terencana dan terkendali.

Namun yang terjadi akhir-akhir ini kebijakan impor dilakukan tidak terencana, ugal-ugalan dan tanpa standar yang jelas. Buktiyanya kebijakan impor

beras dilakukan saat petani panen raya. impor garam kala stok masih berseakan di ladang-ladang. Kebijakan ini tentu saja bukan hanya memukul, tapi juga secara nyata mencederai rasa keadilan. Belumlah kering peluh di badan saat mencangkul, sudahlah basah dengan peluh baru saat impor tiba. capek bertingkat-tingkat

Disisi lain produksi pangan dikebut dengan pendekatan industrial yang berulangkali tidak tepat sasaran, tersebutlah food estate. ironisnya badan pangan menjadi amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang

pangan tidak pernah terbentuk. Sebab, dengan adanya satu lembaga khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, maka diharapkan akan mampu mengatasi persoalan pangan yang selama ini dialami Indonesia.

Agar pada akhirnya sengkabut koordinasi dan ego sektoral tidak terjadi, kala Kemendag mengatakan stok kurang sehingga harus impor. Sementara Kementan mengatakan stok mencukupi.

Selain meningkatkan kualitas produksi para produsen, disaat bersamaan

juga mendorong strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif melalui berbagai kanal.

Pemerintah giat meningkatkan daya saing produk dalam negeri, hal tersebut harus dikoordinasikan dengan pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor pada bulan Februari 2021 sebesar US\$ 13,26 miliar. Jumlah ini meningkat 14,86% year on year (yoy) dari impor bulan Februari 2020 yang sebesar US\$ 11,55 miliar. Impor terjadi dari hal yang kecil,

hingga yang besar. dari mulai kedelai hingga jahe, seakan pemerintah punya persoalan di imunitas perkuat produktivitas dalam negeri.

Sepanjang tulang punggung pemenuhan kebutuhan bersimpuh dari impor, maka sepanjang itu pula nilai produksi dalam negeri akan terpuruk. akan terus membungkuk dihadapan kepentingan pragmatis. Pada akhirnya pihak-pihak perantara produk luar negeri yang menanggung untung. Janggankan membenci, nampak perkasa diri tidak tegak.

# Aleg PKS Minta Pemerintah Jangan Bebani Rakyat dengan Kenaikan Harga Komoditas Jelang Ramadan

## KUTIPAN

Bekasi (23/03) — Anggota Komis VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, Mahfudz Abdurrahman, meminta kepada Pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan dan idul fitri.

Mahfudz mengatakan stok barang kebutuhan pokok masyarakat yang aman dan dipastikan tersedia untuk momen Ramadhan dan Idul Fitri akan sangat berpengaruh pada harga.

“Jika stok barang kebutuhan pokok bagi masyarakat aman dan dipastikan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang tinggi di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, hal ini dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak punya peluang untuk menaikkan harga sesuai keinginannya sepihak”, ungkapnya.

Sehingga kata Mahfudz, melonjaknya harga yang terjadi dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya yang masyarakat ekonominya menengah ke bawah. Apalagi masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingkat kemampuan membeli.

“Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah agar mampu memberikan jaminan kondisi ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dan akan sangat senang jika stabilitas harga tetap terjaga

dan tidak mengalami kenaikan, sehingga masyarakat bisa lebih khusus melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadhan,” paparnya.

Mahfudz pun menegaskan, kehadiran pemerintah dalam penanganan masalah pasokan bahan sembako guna kebutuhan di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dan menjaga stabilitas harga menjadi bukti bahwa pemerintah sangat peduli terhadap masyarakat secara keseluruhan.

“Sehingga selama bulan puasa dan lebaran masyarakat tidak terbebani dengan naiknya harga bahan kebutuhan pokok di pasaran, dan tidak mungkin akan memicu keresahan pada masyarakat sehingga terjadi keributan”, tegas Mahfudz.

Perlu diketahui bahwa Ramadhan tinggal hitungan hari, Umat Islam di Indonesia khususnya akan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1442 H dan Hari raya Idul Fitri.

Tentu sebagai muslim yang baik pastinya merasa senang dan bahagia dipertemukan



**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah agar mampu memberikan jaminan kondisi ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dan akan sangat senang jika stabilitas harga tetap terjaga dan tidak mengalami kenaikan, sehingga masyarakat bisa lebih khusus melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadhan”

kembali dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat.

Perasaan gembira umat Islam menyambut datangnya

bulan suci Ramadhan merambah ke seluruh aktivitas kehidupan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Mendukung Penegakan Hukum  
Yang Berkeadilan

## Fraksi PKS Terima Aspirasi TP3 Enam Laskar FPI

### KUTIPAN

Jakarta (30/03) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, didampingi Sekretaris Fraksi Leadia Hanifa Amalia,

Wakil Ketua Fraksi Adang Daradjatun, Netty Prasetyani, dan Suryadi, menerima audiensi delegasi Tim Pengawas Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI. Dalam audiensi ini TP3 dipimpin oleh Abdullah Hehamahua dan Marwan Batubara.

Dalam pernyataannya, TP3 menilai dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat dalam kasus wafatnya 6 Laskar FPI di tangan aparat. Untuk itu, TP3 meminta agar pengadilan HAM berat ditegakkan berdasarkan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tewasnya 6 Laskar FPI memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan pada Pasal 9 UU 26 Tahun 2000.

Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan merasa terhormat dengan kehadiran TP3 yang disebutkan

sebagai pejuang keadilan di negeri ini. Dan, Fraksi PKS berkomitmen akan terus memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia, bukan hanya dalam kasus enam Laskar FPI tapi juga seluruh kasus ketidakadilan yang terjadi di negara ini.

"Jika supremasi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas maka keadilan sedang tercabik-cabik, kezaliman sedang berlangsung. Dampaknya akan hancur sistem berbangsa dan bernegara. Keadilan akan menghadirkan ketenteraman. Sementara, ketidakadilan akan menimbulkan kegaduhan," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada TP3 yang benar-benar serius menyelidiki, mengumpulkan bukti-bukti dan

memperjuangkan keadilan di negeri ini terutama dalam kasus wafatnya 6 Anggota Laskar FPI. Data-data yang disampaikan menjadi amunisi yang kuat bagi Fraksi PKS untuk menyuarakan aspirasi tersebut di parlemen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.

"Fraksi PKS akan melakukan langkah-langkah politik konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi TP3 Enam Laskar FPI. Pertama, Fraksi PKS akan berkirim surat kepada Komnas HAM untuk mendapat masukan objektif termasuk meminta tanggapan atas masukan publik yang disampaikan TP3," terang Jazuli.

Kedua, Fraksi PKS sendiri telah membentuk tim investigasi melalui anggota di Komisi III. Dan sesuai aspirasi, Fraksi PKS akan mengusulkan Pansus Hak Angket untuk menyelidiki kasus ini agar keadilan benar-benar tegak.

Selanjutnya, Fraksi PKS meminta agar aspirasi disampaikan juga kepada Fraksi-Fraksi di DPR karena ini kepentingan kita semua untuk menegakkan keadilan kepada warga negara yang dilindungi



### Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Jika supremasi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas maka keadilan sedang tercabik-cabik, kezaliman sedang berlangsung. Dampaknya akan hancur sistem berbangsa dan bernegara.

Keadilan akan menghadirkan ketenteraman. Sementara, ketidakadilan akan menimbulkan kegaduhan

hak asasinya.

"Kami ingin tegaskan bahwa pengungkapan kasus ini bukan soal keberpihakan

kepada kelompok tertentu, tapi soal penegakan keadilan yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara," pungkas Jazuli.



## Fraksi PKS Terima Aspirasi TP3 Enam Laskar FPI

Jakarta (30/03) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, didampingi Sekretaris Fraksi Leadia Hanifa Amalia, Wakil Ketua Fraksi Adang Daradajatun, Netty Prasetyani, dan Suryadi, menerima audiensi delegasi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI. Dalam audiensi ini TP3 dipimpin oleh Abdulloh Hehamahua dan Marwan Batubara.

Dalam pernyataannya, TP3 menilai dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat dalam kasus wafatnya 6 Laskar FPI di tangan aparat. Untuk itu, TP3 meminta agar pengadilan HAM berat ditegakkan berdasarkan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tewasnya 6 Laskar FPI

memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan pada Pasal 9 UU 26 Tahun 2000.

Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan merasa terhormat dengan kehadiran TP3 yang disebutnya sebagai pejuang keadilan di negeri ini. Dan, Fraksi PKS berkomitmen akan terus memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia, bukan hanya dalam kasus enam Laskar FPI tapi juga seluruh kasus ketidakadilan yang terjadi di negara ini.

"Jika supremasi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas maka keadilan sedang tercabik-cabik, kezaliman sedang berlangsung. Dampaknya akan hancur sistem berbangsa dan bernegara.

Keadilan akan menghadirkan ketenteraman. Sementara, ketidakadilan akan menimbulkan kegaduhan," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada TP3 yang benar-benar serius menyelidiki, mengumpulkan bukti-bukti dan memperjuangkan keadilan di negeri ini terutama dalam kasus wafatnya 6 Anggota Laskar FPI. Data-data yang disampaikan menjadi amunisi yang kuat bagi Fraksi PKS untuk menyuarkan aspirasi tersebut di parlemen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.





# JAGA MARTABAT HUKUM DENGAN KEADILAN

“Jika supremasi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas maka keadilan sedang tercabik-cabik, kezaliman sedang berlangsung. Dampaknya akan hancur sistem berbangsa dan bernegara. Keadilan akan menghadirkan ketenteraman. Sementara itu, ketidakadilan akan menimbulkan kegaduhan”

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

# Fraksi PKS Mengecam Keras Penganiayaan Terhadap Wartawan

## KUTIPAN

Fraksi PKS mendukung sikap tegas insan pers, masyarakat sipil, dan Komnas HAM yang mengecam keras pemukulan dan intimidasi yang dialami wartawan Tempo Nurhadi sebagai pelanggaran serius

Jakarta (28/03) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengecam keras pemukulan dan intimidasi yang dialami oleh wartawan Tempo Nurhadi ketika melakukan tugas jurnalistik di Surabaya pada Sabtu, 28/3. Dirinya prihatin dan menyayangkan di era demokrasi dan kebebasan pers yang dilindungi konstitusi dan undang-undang masih ada orang atau pihak-pihak yang

melakukan intimidasi terhadap wartawan.

"Intimidasi kepada wartawan ini gaya lama yang semestinya diakhiri dengan hadirnya reformasi dan demokrasi yang semakin baik. Ancaman terhadap wartawan dan pers yang bebas adalah ancaman terhadap demokrasi itu sendiri," tandas Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, pers adalah pilar demokrasi yang dijamin kebebasannya karena tugasnya menyajikan informasi sekaligus kontrol bagi jalannya reformasi dan demokrasi. Tentu dalam praktiknya pers harus tetap menyajikan informasi yang bertanggung jawab.

Fraksi PKS mendukung sikap tegas insan pers, masyarakat sipil, dan Komnas HAM yang mengecam keras pemukulan dan intimidasi yang dialami wartawan Tempo Nurhadi sebagai pelanggaran serius. Fraksi PKS juga mendukung penuh agar kasus ini diproses dan diusut tuntas baik melalui jalur hukum maupun melalui saluran-saluran konstitusional lain yang tersedia.

"Kasus ini harus menjadi

pelajaran bersama agar tidak terulang lagi. Mahal harga yang dibayar bangsa ini untuk melahirkan pers yang bebas melalui reformasi dan demokrasi yang semakin terlembaga. Jangan dicerderai dengan tindakan yang membuat kita mundur ke belakang atau setback," pungkask Jazuli.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Kasus ini harus menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang lagi. Mahal harga yang dibayar bangsa ini untuk melahirkan pers yang bebas melalui reformasi dan demokrasi yang semakin terlembaga. Jangan dicerderai dengan tindakan yang membuat kita mundur ke belakang atau setback,

# Terkait Bom di Makassar, Patut Diduga by Design

## KUTIPAN

Peristiwa ini, kata Surahman, patut dicurigai dilakukan by design yang tujuannya untuk menciptakan suasana saling curiga antar umat beragama. Oleh karena itu dihimbau kepada semua umat untuk tetap tenang dan merapatkan barisan," tegas Surahman.

Jakarta (30/03) — Anggota DPR RI komis VIII dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri terjadi di depan Katedral Makassar pada 28 Maret 2021.

"Ini merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pengecut yang tidak ada kaitan sama sekali dengan agama apapun," ungkap Surahman.

Peristiwa ini, lanjut Surahman, justru merobek harmoni masyarakat dan kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik.

"Disamping itu, bagi umat Islam sendiri, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan

spirit nisfu Sya'ban yang diyakini sebagai waktunya disetorkan amal manusia ke hadapan Allah. Setiap muslim menginginkan saat amal disetorkan, mereka sedang sibuk melakukan berbagai aktifitas kebaikan seperti menyantuni fakir miskin dan membela orang-orang lemah," pungkasnya.

Surahman menambahkan tidak ada seorang muslim pun yang menginginkan saat catatan amalnya disetorkan dalam keadaan sedang melakukan kejahatan, seperti menyakiti atau membunuh orang lain.

"Ditambah lagi saat ini kita sedang menyambut datangnya

bulan suci Ramadhan, bulan yang mengajarkan kepada umat Islam untuk meningkatkan amal ibadah dalam rangka mendekat diri kepada Ilahi," ujar Ketua Dewan Syariah Pusat PKS ini.

Ramadhan, imbuhnya, juga mengajari kita untuk merasakan penderitaan orang lain hingga lahir semangat solidaritas, saling menolong dan menjalin silaturahmi dengan sesama manusia.

"Seluruh kaum muslimin menginginkan suasana tenang dan damai saat melaksanakan puasa, shalat tarawih, tadarrus Al-Qur'an dan saat merayakan Idul Fitri," paparnya.

Peristiwa ini, kata Surahman, patut dicurigai dilakukan by design yang tujuannya untuk menciptakan suasana saling curiga antar umat beragama.

"Oleh karena itu dihimbau kepada semua umat untuk tetap tenang dan merapatkan barisan," tegas Surahman.

Terakhir, lanjut Surahman, peristiwa ini semakin memperkuat reasoning untuk secepatnya dibahas RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.



**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Ini merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pengecut yang tidak ada kaitan sama sekali dengan agama apapun. Peristiwa ini, justru merobek harmoni masyarakat dan kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik.



Kunker ke Korem 045/  
Garuda Jaya Babel

## Syaikhu Tanyakan Bantuan Motor untuk Babinsa

### KUTIPAN

Bangka Belitung  
(25/03) — Anggota  
Komisi I DPR RI dari  
Fraksi PKS, Ahmad  
Syaiqhu,

Hal itu disampaikan Syaikhu dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Markas Resort Militer (Korem) 045/Garuda Jaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu, (24/03).

Syaiqhu mengungkapkan, saat dirinya menjadi Wakil Walikota Bekasi pada 2013-2018, Pemkot membuat kebijakan untuk memberikan bantuan motor kepada Babinsa.

"Ketika jadi Wakil Walikota Bekasi, Babinsa kami berikan bantuan berupa sepeda motor," ungkap Syaikhu.

Menurut Syaikhu, kebijakan tersebut perlu dilakukan karena Babinsa bekerja di lapangan dengan mobilitas tinggi, sementara sarana sepeda motor masih kekurangan

sekitar 181 unit.

"Bantuan ini penting. Sebab mereka ada di lapangan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mobilitasnya tinggi sekali," jelas Syaikhu.

Syaiqhu yang juga Presiden PKS itu melakukan Kunker Komisi I selama tiga hari, yakni 24-26 Maret di Babel. Kedatangan rombongan disambut Gubernur Babel, Erzaldi Rosman di Ruang VVIP Bandara Depati Amir, Rabu (24/03/2021).

Gubernur menjelaskan kunjungan pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI ini menindaklanjuti undangan Pangdam II Sriwijaya.

Gubernur berharap, Kunker ini dapat menguatkan dukungan dana untuk mengembangkan fasilitas baik untuk anggota maupun infrastruktur TNI, demi peningkatan kekuatan dan ketahanan.

"Saya berharap dalam diskusi nanti dapat membuahkan hasil yang Insya Allah dapat kita realisasikan," harapnya.



### H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi I DPR RI



“Ketika jadi Wakil Walikota Bekasi, Babinsa kami berikan bantuan berupa sepeda motor, tersebut perlu dilakukan karena Babinsa bekerja di lapangan dengan mobilitas tinggi, sementara sarana sepeda motor masih kekurangan sekitar 181 unit. Bantuan ini penting. Sebab mereka ada di lapangan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mobilitasnya tinggi sekali”

# Wakil Ketua FPKS: Konsep Bela Negara **Harus** Utuh dan Matang

## KUTIPAN

Jakarta (25/03) --- Kementerian Pertahanan melalui Wakil Menteri Muhammad Herindra berencana akan menjalankan program bela negara sebagai amanat UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan PP No. 3 tahun 2021.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Kamis (25/3) di Jakarta menyatakan, "Saya menyambut baik atas progres ini. Artinya, UU PSDN yang sudah kami bahas dan disahkan oleh DPR pada akhir 2019 lalu bisa diimplementasikan. Tapi, yang harus dipastikan adalah konsep pelaksanaannya musti matang, utuh dan tidak terburu-buru. Harus jelas sasarannya, targetnya, berapa anggarannya dan kapan waktunya."

Mantan anggota Panja REU PSDN ini menjelaskan bahwa rekrutmen bela negara yang di dalamnya termasuk Komponen Cadangan harus dibicarakan dengan Komisi I DPR, berapa yang mau direkrut, berapa anggaran yang

diperlukan, bagaimana rencana pengelolaan setelah pelatihan, dan seterusnya. Dengan harapan semuanya terbuka, jelas, transparan, sehingga rakyat tak lagi resah. Bentuk pengawasan terselenggaranya program ini ada di DPR. Masyarakat sempat resah adanya isu wajib militer atau potensi tidak terjaminnya hak asasi manusia.

"Makanya, Kemenhan harus terus berdialog, berdiskusi dan bermusyawarah dengan Komisi I, untuk memastikan pengawasan berjalan sehingga rakyat menjadi lebih tenang. Sekaligus, rakyat bisa menyampaikan kepada Komisi I DPR jika menemukan

pelaksanaannya nanti ada yang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan," urai Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menegaskan agar selain menyiapkan konsep bela negara dalam konteks pembentukan sumber daya manusia (SDM), Kemenhan perlu juga untuk menyiapkan konsep bela negara dalam konteks pembentukan sumber daya material (barang).

"Objek Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ada 2, manusia dan barang. Yang berbentuk barang ini mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB) serta sarana dan prasarana nasional. Kita seringkali fokus kepada bela negara, yaitu pembentukan komponen pendukung dan komponen cadangan dalam aspek manusianya, tapi kita sering lupa bahwa di dalamnya juga terakup material. Jadi seolah tidak utuh," katanya.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

“Rekrutmen bela negara yang di dalamnya termasuk Komponen Cadangan harus dibicarakan dengan Komisi I DPR, berapa yang mau direkrut, berapa anggaran yang diperlukan, bagaimana rencana pengelolaan setelah pelatihan, dan seterusnya. Dengan harapan semuanya terbuka, jelas, transparan, sehingga rakyat tak lagi resah

# Legislator PKS Dukung Sidang HRS Offline: Kasusnya Jadi Perhatian Publik

## KUTIPAN

Jakarta (24/03) — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menagubulkan permintaan Habib Rizieq Shihab (HRS) beserta kuasa hukumnya terkait persidangan diselenggarakan secara langsung di ruang sidang atau offline.

Politikus PKS, Achmad Dimiyati Natakusumah, mendukung sidang online karena menurutnya kasus HRS menjadi perhatian publik dan debatable.

"Perkara-perkara yang sangat menjadi perhatian publik, perkara yang sangat penting itu sebaiknya memang offline, kalau perkara yang sudah terkait dengan yang sudah jelas begitu mau online, mau apa ya sudah. Tapi ini kan memang menjadi debatable dan menjadi perhatian publik," kata Dimiyati saat dihubungi, Selasa (23/3/2021).

Anggota Komisi III DPR ini menilai persidangan secara online memang kerap menemui kendala, salah satunya masalah

suara tidak terdengar.

Menurutnya sidang secara offline pada kasus Habib Rizieq justru akan mempermudah pembuktian. Dia menilai hakim menjadi lebih jelas dalam memutuskan secara adil nantinya jika mendengar penjelasan yang jelas.

"Kalau lebih enak kan offline, lebih mudah kan dalam persidangannya dan lebih mudah tidak ada permasalahan teknis tentang internet maupun problem dengan komunikasi yang kadang ada sinyal, kadang nggak ada, jadi kalau problematika itu tidak ada ya mau online itu tidak masalah, tapi begitu suara putus-putus tidak terdengar gimana hakim

bisa memutuskan secara adil, kan hukum pembuktian," ucapnya.

"Nah jadi permintaan salah satu pihak gitu ya harus didengar. Permintaan minta offline ya offline, kalau saya harap hakim harus bisa menerima itu dan bisa terlihat nanti, kan hukum pembuktian, pembuktian itu bisa putusan seadil-adilnya, apa lagi hakim ini pertanggungjawabannya bukan kepada manusia tetapi kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap juga prinsip-prinsip rule of law harus dipegang di antaranya equality before the law, supreme of law harus ditegakkan, process of law betul diterapkan," sambungnya.

Meski demikian, Dimiyati meminta kepada Habib Rizieq untuk mengimbau para pengikutnya untuk tidak berkerumun datang ke persidangannya nanti. Dia meyakini yang betul-betul pengikut Habib Rizieq akan mematuhi arahan Habib Rizieq.

"Saya yakin nanti dimintalah kepada pihak Pak Habib Rizieq untuk termasuk



**DR. H. R. A. DIMYATI  
NATAKUSUMAH, SH, MH**  
Anggota Komisi III DPR RI

"Saya yakin nanti dimintalah kepada pihak Pak Habib Rizieq untuk termasuk apa namanya pengikutnya, pengikut beliau kan banyak gitu jadi orang tau lah Habib Rizieq banyak pengikutnya, maka dengan sendirinya harus diimbau kepada pengikutnya dibatasi, saya yakin nurut lah, patuh lah, pengikutnya nggak mungkin (nggak nurut) kecuali pengikutnya itu bukan pengikut benar, pengikut ikut-ikutan yang jadi problem"

apa namanya pengikutnya, pengikut beliau kan banyak gitu jadi orang tau lah Habib Rizieq banyak pengikutnya, maka dengan sendirinya harus diimbau kepada pengikutnya

dibatasi, saya yakin nurut lah, patuh lah, pengikutnya nggak mungkin (nggak nurut) kecuali pengikutnya itu bukan pengikut benar, pengikut ikut-ikutan yang jadi problem," ujarnya.

# Perubahan Undang-Undang Kejaksaan RI, Adang Daradjatun: Setuju, Dengan Beberapa Catatan

## KUTIPAN

Adang juga menyampaikan beberapa catatan terkait RUU ini yang menyangkut kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia (RI) dan definisi jaksa yang berhubungan dengan kewenangan dan jabatan fungsional.

**Jakarta** (25/03) — Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI, Adang Daradjatun menyatakan persetujuan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Adang juga menyampaikan beberapa catatan terkait RUU ini yang menyangkut kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia (RI) dan definisi jaksa yang berhubungan dengan kewenangan dan jabatan fungsional.

“Namun, ada beberapa catatan yang ingin disampaikan menyangkut masalah kedudukan Kejaksaan RI dan definisi Jaksa, dimana dalam hal ini ada hubungannya dengan kewenangan dan jabatan fungsional yang sebetulnya sudah terpenuhi penyesuaian dengan adanya hukum acara pidana,” ungkap Adang.

Adang melanjutkan penyampaian catatan terkait kewenangan jaksa dan masalah penggunaan senjata api oleh jaksa.

“Kedua adalah

kewenangan jaksa dalam penuntutan dan juga jaksa yang melakukan tindak pidana, ini juga akan menjadi catatan dari kami. Ketiga, masalah penggunaan senjata api oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya ada beberapa catatan yang kami sampaikan,” jelas Adang.

Sebagai penutup, Adang menyampaikan catatan terkait rangkap jabatan bagi jaksa agung dan menyatakan kembali persetujuan terkait RUU ini.

“Yang terakhir dihapusnya ketentuan larangan rangkap jabatan bagi jaksa agung. Demikian catatan dari kami, pada dasarnya kami menyetujui RUU ini dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.” tutup Adang.



**Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Komisi III DPR RI

“Dihapusnya ketentuan larangan rangkap jabatan bagi jaksa agung. Demikian catatan dari kami, pada dasarnya kami menyetujui RUU ini dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku”

# Terkait Persidangan HRS, Habib Aboe: Pemaksaan Sidang secara Online Berpotensi Melanggar HAM

## KUTIPAN

Jakarta (22/03) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy menyoroti persidangan Habib Rizieq Shihab yang diadakan secara online, Jumat, (19/03/2021).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, seharusnya Habib Rizeq diperlakukan sebagai warga negara sebagaimana umumnya dalam pengadilan. Karena ini adalah prinsip equality before the law, yaitu persamaan perlakuan di depan hukum.

"Oleh karenanya proses persidangan seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," tegas Habib Aboe.

Pemenuhan acara pidana, kata Habib Aboe, adalah salah satu parameter untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Karena bangsa ini

menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945," terang Habib Aboe.

Pemaksaan pemeriksaan seorang tersangka, lanjutnya, untuk tidak hadir dalam persidangan berpotensi mengurangi hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki.

"Apalagi pada kasus lain seperti kasus Djoko Tjandra sampai dengan Jaksa Pinangki semua tersangka bisa leluasa menghadiri persidangan. Tentu ini menjadi preseden tidak baik, ketika seolah olah terlihat ada diskriminasi. Dimana seorang tersangka ngotot mau bersidang namun jaksa tidak menghendaki," terang Ketua

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.

Habib Aboe menambahkan, pihaknya meminta Komisi Yudisial memberikan atensi pada kasus ini, karena kasus ini menjadi perhatian publik.

"Tentunya KY seharusnya memastikan persidangan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula Komnas HAM, seharusnya memantau persidangan tersebut. Karena pemaksaan seseorang terdakwa bersidang secara online berpotensi pada pelanggaran HAM," ungkap Sekjen DPP PKS ini.

"Kami mengingatkan kepada semua pihak agar konsisten dengan ketentuan UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, perlu komitmen dari semua pihak untuk tegak lurus mengikuti prosedur yang ada," tutup Habib Aboe.



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

"Seharusnya Habib Rizeq diperlakukan sebagai warga negara sebagaimana umumnya dalam pengadilan. Karena ini adalah prinsip equality before the law, yaitu persamaan perlakuan di depan hukum. Oleh karenanya proses persidangan seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"

# PRESIDEN TIGA PERIODE & LAHIRNYA NEGARA KEKUASAAN



“ Menolak gagasan Presiden 3 Periode itu amanat reformasi yang merupakan buah pembelajaran Anak Bangsa terhadap pengalaman sejarah Indonesia masa lalu. Sehingga diabadikan dalam norma Konstitusi kita.

“ Sehingga tidak perlu dikaitkan dengan pencalonan JOKOWI atau juga mungkin pencalonan SBY sebagai Capres 2024.

“ Pak SBY pada masanya sangat tegas untuk menolak Capres 3 Periode. Pak Jokowi juga begitu pada statement pribadinya. Ibu Megawati juga menolak dengan tegas mengenai isu jabatan presiden tiga periode.

([www.wartaekonomi.co.id](http://www.wartaekonomi.co.id))

“ Jadi orang-orang yang *setback* ke gagasan Presiden 3 Periode itu adalah orang-orang yang tidak belajar dari sejarah Indonesia. Dan cenderung ingin menghidupkan kultus politik kepemimpinan Nasional. **Ini bahaya. Kultus itu akan mendarah matinya Demokrasi & rusaknya konsep negara hukum.** Yang akan lahir adalah negara kekuasaan bukan negara hukum. Bukan lagi *rule of law* tapi ***law of ruler***.

Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si  
Anggota Komisi I DPR RI FPKS



**CUKUP 2  
PERIODE**

# Impor Skala Besar di kala Panen, Aleg PKS : Pemerintah **Tidak Empati** Terhadap Penderitaan Rakyat

## ● KUTIPAN

Jakarta (19/03) — Anggota Komisi IV Fraksi PKS DPR RI, Slamet menilai tindakan impor dalam skala besar yang dilakukan pemerintah saat ini bukanlah hal yang tepat, terlebih saat ini juga merupakan waktu dimana para petani sedang panen.

Slamet mengungkapkan bahwa stok beras Indonesia masih terbilang sangat cukup hingga akhir tahun 2021, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Usaha Logistik (Bulog).

“Data dari Kementan dan Bulog menunjukkan bahwa stok kita cukup. Dengan alasan apapun tidak seharusnya hari ini kita melakukan impor. Bukan berarti kita tidak menyukai impor, tetapi seharusnya disesuaikan dengan kondisi hari ini yang sedang panen,” ungkap Slamet dalam PKS Legislative Corner, Jumat (19/03).

Slamet juga mengungkapkan bahwa komoditas garam yang dimiliki petani Indonesia masih memiliki kualitas yang kurang memenuhi standar sehingga sulit untuk diserap oleh pasar.

“Disini justru saya menuntut hadirnya pemerintah, kalau masalah ini diselesaikan dengan cara yang instan yaitu impor, rakyat kita mau dibawa kemana? Dengan teknologi yang ada saat ini, pemerintah harus hadir memberi edukasi dan perlindungan sehingga kualitas garam bisa meningkat,” jelas Slamet.

Slamet juga memberi

tanggapan terhadap pernyataan Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa impor skala besar ini tidak akan mempengaruhi harga gabah.

“Ini adalah logika sederhana, sebelum ada isu impor ini harga gabah ada di garis normal dan setelah ada isu impor ini harga gabah turun. Bagaimana pemerintah bisa mengatakan bahwa impor tidak berpengaruh? Menurut saya ini bukan hanya ngawur, tetapi pemerintah tidak memiliki rasa empati terhadap penderitaan rakyat kita,” tegas Slamet.

Sebagai penutup, Slamet mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk memuliakan para petani kedepannya.

“Kita meyakini bahwa ketika petani berdaya, Indonesia akan jaya. Ini yang harus dipahami oleh kita semua terutama pemerintah, sehingga seluruh program dan kebijakannya bisa memuliakan petani karena ini terkait dengan kedaulatan bangsa,” tutup Slamet.



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

“Data dari Kementan dan Bulog menunjukkan bahwa stok kita cukup. Dengan alasan apapun tidak seharusnya hari ini kita melakukan impor. Bukan berarti kita tidak menyukai impor, tetapi seharusnya disesuaikan dengan kondisi hari ini yang sedang panen,”

# Tanggapi Presiden Jokowi Soal Impor Beras, Aleg PKS: Penolakan Meluas karena Rugikan Petani

## KUTIPAN

Jakarta (27/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang memastikan tidak akan mengimpor beras sampai Bulan Juni 2021 dan meminta perdebatan mengenai impor beras dihentikan.

Menurut Johan, Pemerintah sendirilah yang telah merencanakan impor beras pada saat petani sedang panen raya dan BPS telah merilis data potensi produksi stok beras pada Januari sampai April 2021 sekitar 14 juta ton atau naik 26% dibanding tahun lalu.

"Jadi rencana impor ini dari pemerintah yang telah berdampak luas seperti anjloknya harga gabah yang sangat merugikan petani maka mestinya presiden mengevaluasi model perencanaan kerja pemerintah terkait tata kelola beras sebagai pangan pokok bagi rakyat Indonesia," cetus Johan.

Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menilai adanya perdebatan impor beras

dari berbagai kalangan muncul sebagai respon atas rencana pemerintah yang membuat rencana impor beras tanpa berdasar analisa data yang akurat dimana stok beras nasional cukup dan proyeksi produksi beras meningkat.

"Jadi ini menunjukkan respon publik yang kritis terhadap rencana pemerintah yang telah menciderai kedaulatan pangan nasional. Disamping itu, Perdebatan impor beras muncul karena rencana pemerintah telah merugikan petani secara nyata, jadi bukan perdebatannya yang dihentikan tapi rencana impor berasnya yang harus dihentikan," tegas Johan.

Politisi PKS ini berharap

Presiden dapat segera menyelesaikan carut-marutnya tata Kelola perberasan nasional sebagai komoditi pangan strategis dengan cara segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat dari UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, dimana pada Pasal 126 dinyatakan perlu dibentuk Lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

"Saya melihat Presiden Jokowi harusnya memprioritaskan pelaksanaan undang-undang ini agar berbagai kendala kebijakan pangan dapat segera diatasi serta kita akan lebih mandiri dan punya kebijakan yang jelas yang berkoordinasi langsung kepada Presiden", ujar Johan.

Legislator dari dapil NTB ini menyatakan harusnya impor beras jangan dilakukan selama stok persediaan dalam negeri mencukupi dan mampu dipenuhi dari produksi beras nasional yang berasal dari petani kita.

"Selama ini realisasi pengadaan beras untuk cadangan pemerintah yang



## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

“Saya melihat Presiden Jokowi harusnya memprioritaskan pelaksanaan undang-undang ini agar berbagai kendala kebijakan pangan dapat segera diatasi serta kita akan lebih mandiri dan punya kebijakan yang jelas yang berkoordinasi langsung kepada Presiden”

bersumber dari dalam negeri selalu mengalami penurunan, pada tahun 2017 realisasinya mencapai 2.161.225 ton namun terus turun setiap tahun sehingga perlu kebijakan tegas dari Presiden untuk membeli

gabah dan beras petani pada jumlah tertentu dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan petani pada musim panen raya," urai Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Legislator PKS: Food Estate Antara Harapan dan Kenyataan

## KUTIPAN

Jakarta (23/03) --- Food estate, merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.

Anggota DPR RI dari Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin awal mulanya memiliki harapan kepada pemerintah pada program food estate yang diluncurkan sekitar Oktober 2020 lalu ini akan mampu memberikan kontribusi penyelesaian persoalan pangan yang mampu dicukupi dari dalam negeri.

Presiden Joko Widodo meluncurkan proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah sebagai tahap awal, lahan seluas 30.000 ha dikelola pada food estate ini.

Selain padi sebagai komoditas unggulan, proyek food estate juga meliputi penanaman singkong dan

produk hortikultura lainnya.

Dukungan dan harapan Andi Akmal Pasluddin pada program pengembangan food estate di Kalimantan Tengah yang dicanangkan pemerintah disertai dengan sebuah peringatan agar ketika menjalankan program tersebut tidak dilakukan secara sepele karena ini bukan sebuah kegiatan yang mudah di capai tujuannya.

Lahan yang digunakan untuk program food estate tidak dalam kondisi baik sehingga perlu pembiayaan cukup mahal.

"Food Estate ini Sangat besar pengaruhnya terhadap ketahanan pangan. Tapi dalam pelaksanaannya ini nggak

semudah yang dibayangkan. Karena kan lahannya bukan untuk pertanian, tapi lahan yang diubah untuk pertanian dan kita punya pengalaman gagal," kata Andi Akmal.

Seiring dengan berjalannya waktu, Akmal melihat, pemerintah terkesan memanfaatkan istilah food estate untuk mendapat perhatian dan simpati masyarakat Indonesia tentang betapa seriusnya pemerintah berupaya memperkuat sektor pangan.

"Namun pada kenyataannya, food estate sebagai andalan untuk menyelesaikan persoalan pangan di masa depan seolah masih jauh dari harapan," ungkap Akmal.

Rangkuman informasi APBN 2021 pada program ketahanan pangan, Pengembangan Food Estate di Kalteng, Sumsel dan Papua untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan pemberdayaan petani existing dan investasi small farming pada lahan 165.000 Hektar.

Akmal membeberakan, bahwa dukungan anggaran terhadap Program food estate ini sangat meragukan. Kenyataan yang terjadi adalah faktor utama keberhasilan program penguatan sektor pangan yang berasal dari anggaran negara adalah APBN untuk kementerian Pertanian, telah di potong sebesar Rp 6,3 Triliun, dari semula Rp 21,8 Triliun menjadi Rp 15,5 Triliun. Selengkapnya di fraksi.pks.id



**Dr. H. ANDI AKMAL  
PASLUDDIN, S.P., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Pemerintah terkesan memanfaatkan istilah food estate untuk mendapat perhatian dan simpati masyarakat Indonesia tentang betapa seriusnya pemerintah berupaya memperkuat sektor pangan. Namun pada kenyataannya, food estate sebagai andalan untuk menyelesaikan persoalan pangan di masa depan seolah masih jauh dari harapan”

# Legislator Minta Kemendes PDPT **Hati-Hati** Dalam Menetapkan Daerah Maju

## KUTIPAN

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat meminta Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) berhati-hati dalam menetapkan suatu wilayah yang tertinggal menjadi wilayah maju. menjadi maju.

la menilai, keputusan yang dibuat oleh Kemendes PDPT kerap tidak berdasarkan dengan realita dan fakta di lapangan. Untuk itu dibutuhkan riset yang akurat dalam menetapkan suatu wilayah tertinggal menjadi maju.

“Harus hati-hati dalam menetapkan wilayah yang tadinya tertinggal menjadi maju, jangan sampai salah. Kenyataannya adalah ketika dicek langsung, daerah tersebut ternyata masih tertinggal,” kata Syahrul saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan jajaran Kementerian Desa PDPT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa

(23/3/2021).

Politisi PKS ini menilai, terdapat tolok ukur dalam memutuskan suatu daerah yang tertinggal menjadi maju, di antaranya ialah akses warga yang mudah, sumber daya maju, sarana dan prasarana baik, kemampuan keuangan daerah serta karakteristik wilayah tersebut. Sehingga apabila semua persyaratannya sudah dipenuhi dapat dipastikan daerah tersebut menjadi maju.

“Ada beberapa tolok ukur dalam menetapkan daerah tersebut menjadi maju di antaranya ekonomi yang baik serta akses warga yang mudah

dan infrastruktur baik. Jika ini semua sudah dipenuhi, barulah persyaratan menjadi wilayah yang maju dapat diputuskan bukannya sebaliknya main asal putusan saja tetapi faktanya tidak seperti itu,” ujar Syahrul.

Di sisi lain ia mempertanyakan nasib guru-guru yang mengajar untuk daerah tertinggal setelah diputuskan menjadi wilayah maju, sebab selama daerah tersebut tertinggal para pengajar mendapatkan tunjangan yang dibayarkan langsung oleh pemerintah. “Saya bertanya bagaimana nasib guru yang mengajar di daerah tertinggal tetapi diputuskan menjadi maju apakah mereka masih dapat tunjangan?” tanya legislator dapil Riau II itu. (tn/sf)



**H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Komisi V DPR RI

“Ada beberapa tolok ukur dalam menetapkan daerah tersebut menjadi maju di antaranya ekonomi yang baik serta akses warga yang mudah dan infrastruktur baik. Jika ini semua sudah dipenuhi, barulah persyaratan menjadi wilayah yang maju dapat diputuskan bukannya sebaliknya main asal putusan saja tetapi faktanya tidak seperti itu,”

# PKS Dorong Pemerintah Perkuat BUMDes Untuk Bangkitkan Ekonomi

## KUTIPAN

Jakarta (24/03) --- Pemerintah menargetkan penambahan jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju pada tahun 2021 sejumlah 1.250.

Menurut Anggota DPR RI Komisi V Hamid Noor Yasin dari Dapil Jateng 4 Wonorejo, Sragen dan Karanganyar ini mengatakan "kita patut mengapresiasi rencana tersebut, namun demikian pada kenyataannya selama ini pembentukan BUM Desa bukan tanpa masalah. Terdapat informasi bahwa pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terdapat 2.188 BUM Desa yang mangkrak alias terbelengkalai atau tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa," ujarnya.

Kegagalan tersebut disebabkan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan serta adanya beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa.

Hamid yang berasal dari FPKS ini menegaskan dalam pengelolaan BUM Desa dibutuhkan adanya pengaturan organisasi yang baik, agar pengurus BUM Desa dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal. Sulitnya menemukan potensi desa juga merupakan kendala dalam pengembangan BUM Desa, hal ini karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah. Selain itu masalah klasik berupa terbatasnya akses permodalan mengakibatkan beberapa desa yang punya keinginan untuk maju menjadi gagal maju karena terbentur permodalan yang kurang.

Demikian pula masalah bahan baku, teknologi serta peralatan pendukung sangat dibutuhkan bagi BUM Desa yang menjadikan sektor

produksi sebagai inti bisnisnya. Dan terakhir adalah masalah promosi, dimana BUM Desa yang pengelolannya sudah baik serta memiliki output yang berkualitas seringkali masih kesulitan dalam menjual produknya.

"Dalam memandang seluruh masalah tadi perlu diselesaikan secara komprehensif oleh Pemerintah melalui suatu sistem yang terintegrasi. Selain memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan, perlu juga disediakan kemudahan akses kepada modal dan bahan baku serta promosi melalui sistem yang terintegrasi. Kemudahan akses ini diperlukan untuk membantu BUM Desa agar menjadi mandiri dengan mencari segala sesuatu yang dibutuhkan melalui sistem tersebut, sehingga mengurangi ketergantungan BUM Desa terhadap bantuan dari Pemerintah", tutup Hamid.



**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**  
Anggota Komisi V DPR RI

"Dalam pengelolaan BUM Desa dibutuhkan adanya pengaturan organisasi yang baik, agar pengurus BUM Desa dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal. Sulitnya menemukan potensi desa juga merupakan kendala dalam pengembangan BUM Desa, hal ini karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah"

# Legislator PKS: Proyek Kereta Api Cepat Berpotensi **Bebani APBN**

## KUTIPAN

Jakarta (24/03) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, menyesalkan membengkaknya biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Rp23 Triliun.

Menurut Sigit, pembengkakan biaya atau Cost Overruns yang mencapai 23 persen dari nilai awal yang besarnya US\$6,071 miliar itu dikhawatirkan berpotensi membebani APBN.

“Sejak awal memang proyek ini memang sudah diprediksi akan bermasalah karena seperti dipaksakan meski tidak memiliki prospek bisnis dan operasional. Bahkan sejumlah aturan ditabrak. Tak heran kalau belakangan muncul masalah seperti ini akibat perencanaan yang kurang matang. Yang saya khawatirkan, pembengkakan biaya ini akan membebani anggaran negara,” kata Sigit yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI dari FKPS.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia melalui konsorsium badan usaha pelat merah

bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60 persen saham di perusahaan patungan Indonesia dan China itu.

Empat badan usaha milik negara itu adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) masing-masing 25 persen, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk 12 persen.

Adapun 40 persen saham KCI dipegang konsorsium asal Cina, Beijing Yawan HSR Co Ltd.

Pembengkakan biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp23 Triliun tersebut diprediksi bakal membebani keempat BUMN yang masuk dalam konsorsium bersama BUMN Tiengkong. Dan jika keempat perusahaan plat merah

tersebut kekurangan modal, tentu pemerintah akan turun tangan mendanai melalui APBN.

“Kalau BUMN dilibatkan dalam konsorsium tidak masalah, selama mereka hanya mengerjakan. Tapi kalau BUMN juga diminta menyediakan modal investasi, maka itu akan sangat memberatkan. Duit dari mana mereka sebesar itu?”

Pasti minta suntikan modal dari negara yang asalnya juga dari APBN. Dan ini akan semakin membebani APBN jika anggarannya membengkak,” kata Sigit.

Diberitakan sebelumnya, biaya pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak akibat munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi di awal proyek, salah satunya biaya pembebasan lahan. Faktor lainnya adalah perubahan harga pada saat pengerjaan proyek.

Studi kelayakan dari proyek strategis nasional itu disebut belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan, sehingga penyelesaiannya sulit diprediksi.

Selain itu, beban proyek membesar karena penentuan trase yang kurang matang,



## Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

“Kalau BUMN dilibatkan dalam konsorsium tidak masalah, selama mereka hanya mengerjakan. Tapi kalau BUMN juga diminta menyediakan modal investasi, maka itu akan sangat memberatkan. Duit dari mana mereka sebesar itu? Pasti minta suntikan modal dari negara yang asalnya juga dari APBN. Dan ini akan semakin membebani APBN jika anggarannya membengkak”

sehingga bersinggungan dengan berbagai fasilitas umum dan sosial yang harus direlokasi. Meskipun 75 persen pendanaan proyek dibiayai

dengan pinjaman China Development Bank, biaya tambahan yang muncul selama pengerjaan harus ditanggung KCI.

# Terkait Pembangunan Irigasi oleh KemenPUPR, Aleg PKS: Bendungan Lama **Harus Diperhatikan!**

## KUTIPAN

Jakarta (25/03) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi soal rencana pembangunan 500 ribu Hektar Irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi hingga tahun 2024 oleh Kementerian PUPR.

"Saat ini sudah ada 18 bendung yang selesai dengan kapasitas volume tampung total sekitar 1,1 miliar meter kubik, dengan layanan irigasi sekitar 116.000 hektar dan air baku sekitar 7,24 meter kubik per detik," ungkap pria yang akrab disapa SJP ini.

Selanjutnya, SJP menambahkan, akan diselesaikan 13 bendungan pada tahun 2021, sehingga kapasitas tampung akan meningkat 730 juta meter kubik dan layanan irigasi bertambah 134.000 hektar serta air baku akan bertambah sebesar 5,83 meter kubik per detik.

"Fraksi PKS mengapresiasi upaya Pemerintah dalam meningkatkan kemampuan layanan air ini, namun demikian

FPKS berharap Pemerintah juga memperhatikan bendungan lama agar tidak masuk dalam resiko kerusakan yang tinggi. Secara umum kegagalan dan kerusakan yang terjadi pada bendungan di Indonesia diantaranya disebabkan oleh erosi, kerusakan akibat retakan, longsoran, peluapan dan gempa bumi. Sedimen yang menyebabkan kritisnya kondisi bendungan di Indonesia pada umumnya diakibatkan oleh tingginya tingkat erosi yang terjadi di daerah hulu bendungan, akibat maraknya pengalihan fungsi lahan hutan menjadi lahan permukiman penduduk atau areal pertanian baru," terang Suryadi.

Dengan adanya tumpukan sedimen di beberapa wilayah tersebut, lanjutnya, maka daya tampung air waduk atau bendungan pada waktu musim hujan menjadi semakin berkurang yang pada akhirnya mengakibatkan banjir.

"Oleh sebab itu FPKS berpendapat bahwa pemeliharaan bendungan lama juga harus dilaksanakan, sebab jangan sampai tujuan penambahan daya tampung air menjadi terhambat karena adanya bendungan lama yang justru menurunkan daya tampungnya akibat kurangnya pemeliharaan. Semua upaya ini dibutuhkan agar pelaksanaan Pasal 3 UU SDA dapat dilakukan secara konsekwen dimana Negara tidak hanya wajib memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air, namun harus juga menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat serta menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.**  
Anggota Komisi V DPR RI

“Pemeliharaan bendungan lama juga harus dilaksanakan, sebab jangan sampai tujuan penambahan daya tampung air menjadi terhambat karena adanya bendungan lama yang justru menurunkan daya tampungnya akibat kurangnya pemeliharaan”

pembangunan,” ujar SJP.

SJP melanjutkan bahwa Kebijakan work from home (WFH) dan penerapan protokol kesehatan menyebabkan konsumsi air bersih domestik atau rumah tangga meningkat.

"Perbandingan konsumsi air domestik atau rumah tangga pada tahun 2019 adalah 15,41 meter kubik per bulan pada, sekitar 11,9 juta pelanggan,"

urainya.

Kemudian pada tahun 2020, kata SJP, terjadi kenaikan peningkatan pemakaian air sekitar 16 meter kubik lebih per bulan dan peningkatan pelanggan menjadi 13,3 juta pelanggan atau sekitar 16,04% dibandingkan kebutuhan tahun 2019.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Ratifikasi Perdagangan dengan EFTA Agar Tingkatkan Akses UMKM

## KUTIPAN

Jakarta (22/03) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberi catatan bahwa Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara Islandia, Liechtenstien, Norwegia, Siwss (EFTA) tidak serta menghilangkan ketentuan sertifikasi halal yang sudah berlaku.

Demikian diungkapkan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina dalam paparannya dihadapan Menteri terkait rencana kerjasama kemitraan komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara negara EFTA di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerjasama ekonomi.

Ada beberapa catatan dari Fraksi PKS tentang ratifikasi perdagangan ini.

"Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia-Negara negara EFTA harus dapat meningkatkan kinerja

ekspor Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia," ungkap Nevi.

Kedua, lanjut Nevi, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia-Negara negara EFTA harus dapat mengendalikan impor untuk melindungi Industri dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagaimana amanat UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 pasal 54 ayat (3) yang menyatakan Pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat dan melindungi industri

tertentu di dalam negeri dan untuk menjaga neraca pembayaran atau neraca perdagangan.

"Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan barang tidak serta merta dapat menghilangkan ketentuan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman baik kemasan maupun olahan," terang Anggota DPR Asal Dapil Sumatera Barat I ini.

Selain itu, Nevi juga mengingatkan bahwa Ratifikasi Perdagangan ini harus benar-benar bisa membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan pemasaran produknya. Apalagi diproyeksikan bahwa transaksi Perdagangan e-commerce di Indonesia semakin meningkat dengan ratifikasi perdagangan ini. "Karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, yang kontribusinya sekitar 60 persen PDB," tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Rencana kerjasama perdagangan internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara negara EFTA (Indonesia European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) harus benar-benar dikaji secara matang, dengan harapan kerjasama kemitraan yang terjalin dapat memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia

Fraksi PKS turut prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi di Kilang Balongan, Indramayu, Senin (29/3/2021). Karenanya insiden ini perlu segera diatasi agar tidak membahayakan masyarakat sekitar kilang dan berdampak pada pasokan BBM di beberapa wilayah.

## Siapkan Langkah

**Amin Ak** “Saya minta Pertamina menyiapkan langkah strategis dan taktis untuk mengamankan pasokan BBM, disamping penyelamatan aset Pertamina di Refinery Unit (RU) VI Balongan

## Evakuasi Warga

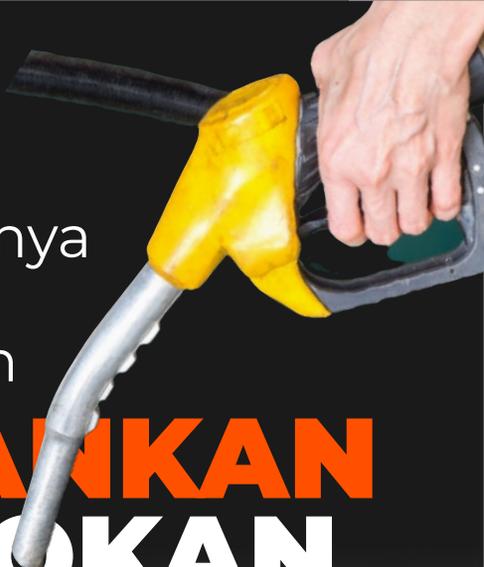
**Rofik Hananto** “Agar Pertamina dibantu dengan BPBD Indramayu untuk segera melakukan langkah evakuasi bagi warga yang berada di sekitar kilang minyak, dan memastikan keamanan dan pemenuhan bantuan untuk kebutuhan warga di Pengungsian”

## Kerahkan Sumber Lain

**Mulyanto** “Pertamina perlu mengerahkan pasokan BBM dari sumber lain agar kegiatan masyarakat dan industri di wilayah strategis tidak terganggu”

# Terbakarnya Kilang Balongan

# AMANKAN PASOKAN BBM



## Perlu Audit Menyeluruh

**Nurhasan Zaldi** “Kasus kebakaran dan permasalahan kilang minyak bukan kali pertama terjadi. menjadi langkah penting untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kilang minyak PT Pertamina. Disisi lain juga otoritas seperti BPH Migas dan Kem-enterian ESDM harus serius memas-tikan seluruh langkah revitalisasi kilang dilakukan dengan serius

# Anggota Komisi VI FPKS: Rangkap Jabatan Direksi/ Komisaris BUMN Cederai Etika Publik

## KUTIPAN

Jakarta (24/03) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, rangkap jabatan Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencederai etika publik dan kontraproduktif terhadap upaya perbaikan pelayanan publik dan tata kelola BUMN yang baik (Good Corporate Governance).

Rangkap jabatan tersebut, kata Amin, juga menabrak undang-undang dan peraturan pemerintah yang juga berdampak pada tidak profesionalnya pelaksanaan tugas mereka.

Amin mengapresiasi penyelidikan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menemukan 62 orang pejabat BUMN baik direksi maupun komisaris merangkap jabatan dan perusahaan non BUMN.

"Jumlah tersebut baru meliputi BUMN yang bergerak di tiga sektor saja. Pertama, sektor keuangan, asuransi dan

investasi. Kedua, sektor pertambangan dan Ketiga, sektor infrastruktur. Amin pun mendukung KPPU melanjutkan penyelidikan sektor-sektor lainnya," papar Amin.

Amin pun meyakini jika praktek rangkap jabatan tidak hanya terjadi di tiga sektor tersebut. Amin juga berharap Kementerian BUMN segera menindaklanjuti temuan penyelidikan dengan langkah-langkah yang nyata demi perbaikan kinerja BUMN.

"Ini luar biasa. Bahkan ada orang yang merangkap hingga 22 jabatan. Potensi konflik

kepentingan dan pelanggaran terhadap penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sangat tinggi," kata Amin.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV ini menyatakan agar BUMN dapat mencapai tujuan pendiriannya maka proses seleksi direksi dan komisaris harus mengedepankan azas profesionalisme dan integritas, bukan dengan pendekatan politik yang berujung pada bagi-bagi jabatan.

Amin menyontokkan pengabaian terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pada Pasal 33 disebutkan, "Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Pasal ini melarang anggota komisaris BUMN merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan," ujarnya.

Dewan komisaris berperan



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Lemahnya tata kelola dan pengawasan merupakan dua hal yang harus menjadi prioritas dalam membenahi BUMN saat ini. Masih banyaknya kasus korupsi dan penyelewengan di tubuh BUMN, termasuk megaskandal Jiwasraya dan Asabri adalah buktinya”

penting dalam penerapan good corporate governance dengan menjalankan peran pengendalian dan pengawasan secara efektif. Jika jabatan komisaris BUMN diserahkan kepada swasta, dikhawatirkan dapat melemahkan pengawasan pemerintah atas perusahaan pelat merah dan mendorong liberalisasi BUMN.

“Lemahnya tata kelola dan

pengawasan merupakan dua hal yang harus menjadi prioritas dalam membenahi BUMN saat ini. Masih banyaknya kasus korupsi dan penyelewengan di tubuh BUMN, termasuk megaskandal Jiwasraya dan Asabri adalah buktinya,” beber Amin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Anggota FPKS: Impor Beras Cederai Cita-cita Swasembada Pangan

## KUTIPAN

Jakarta (22/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli menilai keputusan Pemerintah untuk mengimpor beras sangat kontraproduktif dengan rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bahkan bertolak belakang dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate yang pernah digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu, agenda impor beras jelang panen raya membuat banyak orang sedih. Sebab, Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita ketahui Indonesia pernah swasembada beras, jika saat ini Pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan. Hal ini bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang di canangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditengah

pandemi," ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Rafli menambahkan pada dasarnya kondisi beras kita cukup, asal manajemennya diperbaiki.

"Pembangunan Infrastruktur pertanian, teknologi dan edukasi ke petani bisa meningkatkan hasil produksi yang membuat petani sejahtera dan stok nasional akan terpenuhi dangan catatan di pasar juga diawasi," jelas Rafli

Rafli menyebutkan beberapa daerah di Indonesia saat ini hampir memasuki masa panen.

"Untuk itu kita meminta

pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras. Karena sangat berdampak kepada penurunan harga jual hasil panen petani, serta membuat mental petani terus tertekan," ungkapnya.

"Ingatan masyarakat kita juga masih segar dengan pesan Presiden Jokowi untuk cinta produk lokal, dan benci produk asing. Jika impor dilakukan dimana moral kita?" tanya Rafli menambahkan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan produksi beras pada 2020 lebih tinggi dari 2019. BPS juga merilis potensi peningkatan produksi padi pada 2021, yaitu subround Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88% dibandingkan subround yang sama pada tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

"Miris, Jika ada yang mencari keuntungan ditengah penderitaan rakyat yang hidup dari hasil pertanian, bahkan ini mencederai cita-cita swasembada pangan," tutup Rafli.



## RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

"Tentu, agenda impor beras jelang panen raya membuat banyak orang sedih. Sebab, Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita ketahui Indonesia pernah swasembada beras, jika saat ini Pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan"

# Aleg PKS Minta Pemerintah Jangan Bebani Rakyat dengan Kenaikan Harga Komoditas Jelang Ramadan

## KUTIPAN

Bekasi (23/03) -- Anggota Komis VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, Mahfudz Abdurrahman, meminta kepada Pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan dan idul fitri.

Mahfudz mengatakan stok barang kebutuhan pokok masyarakat yang aman dan dipastikan tersedia untuk momen Ramadhan dan Idul Fitri akan sangat berpengaruh pada harga.

"Jika stok barang kebutuhan pokok bagi masyarakat aman dan dipastikan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang tinggi di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, hal ini dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak punya peluang untuk menaikkan harga sesuai keinginannya sepihak", ungkapnya.

Sehingga kata Mahfudz, melonjaknya harga yang terjadi dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya yang masyarakat ekonominya menengah ke bawah. Apalagi masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingkat kemampuan membeli.

"Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah agar mampu memberikan jaminan kondisi ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dan akan sangat senang jika stabilitas harga tetap terjaga

dan tidak mengalami kenaikan, sehingga masyarakat bisa lebih khusus melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadhan," paparnya.

Mahfudz pun menegaskan, kehadiran pemerintah dalam penanganan masalah pasokan bahan sembako guna kebutuhan di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dan menjaga stabilitas harga menjadi bukti bahwa pemerintah sangat peduli terhadap masyarakat secara keseluruhan.

"Sehingga selama bulan puasa dan lebaran masyarakat tidak terbebani dengan naiknya harga bahan kebutuhan pokok di pasaran, dan tidak mungkin akan memicu keresahan pada masyarakat sehingga terjadi keributan", tegas Mahfudz.

Perlu diketahui bahwa Ramadhan tinggal hitungan hari, Umat Islam di Indonesia khususnya akan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1442 H dan Hari raya Idul Fitri.

Tentu sebagai muslim yang baik pastinya merasa senang dan bahagia dipertemukan



**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah agar mampu memberikan jaminan kondisi ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dan akan sangat senang jika stabilitas harga tetap terjaga dan tidak mengalami kenaikan, sehingga masyarakat bisa lebih khusus melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadhan”

kembali dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat.

Perasaan gembira umat Islam menyambut datangnya

bulan suci Ramadhan merambah ke seluruh aktivitas kehidupan.

Selengkapnyapun kunjungi fraksi.pks.id

# # RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan  
**Sabtu, pukul 10.00 WIB**  
hanya di:

 youtube **PKSTV DPR RI**



# Aleg PKS Desak Pemerintah Sampaikan ke Publik Hasil Renegosiasi Program Pembangunan Pembangkit 35 Ribu MW

**KUTIPAN**

Jakarta (24/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menjelaskan kepada publik terkait hasil renegosiasi program pembangunan pembangkit 35 ribu MW

terutama terkait klausul TOP (take or pay) oleh pembangkitan listrik swasta.

Hal ini, kata Mulyanto, penting diketahui dan ditunggu publik, karena beberapa kali baik dalam rapat kerja maupun di media, Menteri ESDM maupun Dirut PLN berjanji akan melakukan renegosiasi terkait dua hal di atas.

"Kami minta laporan resmi terkait renegosiasi TOP tersebut. Apa saja yang sudah diupayakan Pemerintah agar ketentuan TOP tidak membebani keuangan negara," kata Mulyanto dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan

Menteri ESDM, Dirut PLN beserta jajaran, secara semi-virtual di Gedung Nusantara Senin (22/03/2021).

Menurut Mulyanto dua hal tersebut, sangat mendesak dilakukan di tengah anjloknya permintaan listrik di saat pandemi dan lemahnya kinerja keuangan PLN.

Pemerintah dan PLN, lanjutnya, harus gerak cepat merenegosiasikan skema TOP baru bagi pembangkitan listrik swasta. Sebab selama hal tersebut tidak direvisi maka keuangan PLN akan terbebani.

"Tidak boleh berlarut-larut, karena semakin lama dibiarkan,

akan semakin menekan kondisi kelistrikan nasional dan keuangan PLN. Untuk itu Pemerintah agar segera menyampaikan perkembangan hasil renegosiasi ini kepada publik. Publik berhak tahu dan menunggu soal ini," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Untuk diketahui sejak tahun 2014, Pemerintah berencana menambah pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW, berdasarkan perencanaan yang mengasumsikan pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 7-8 persen.

Namun kenyataannya, pertumbuhan permintaan listrik sebelum dan saat pandemi Covid-19 tidak lebih dari 5 persen. Hari ini saja, terjadi kelebihan pasokan listrik sebesar 30 persen, jauh melebihi batas maksimal cadangan listrik.

Bila program pembangkit 35 ribu MW terus dijalankan sesuai jadwal, maka diperkirakan akan terjadi pembengkakan

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

“Tidak boleh berlarut-larut, karena semakin lama dibiarkan, akan semakin menekan kondisi kelistrikan nasional dan keuangan PLN. Untuk itu Pemerintah agar segera menyampaikan perkembangan hasil renegosiasi ini kepada publik. Publik berhak tahu dan menunggu soal ini”

surplus listrik nasional.

"Ini tentu sangat tidak kita inginkan. Karenaanya Pemerintah diminta untuk merenegosiasikan jadwal

pembangunan dari program pembangkit listrik yang sudah kontraktual," lanjut Mulyanto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Legislator PKS Dorong Dikembangkannya Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Bakar Alternatif

## KUTIPAN

Bogor (26/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mendukung pengolahan sampah menjadi salah satu bahan bakar alternatif, seperti yang sudah dilakukan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk.

Menurut Rofik, PT SBI Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang telah memanfaatkan sampah perkotaan (municipal solid waste/MSW) sebagai bahan bakar alternatif dalam pembuatan semen lewat fasilitas tempat pengelolaan sampah terpadu refused derived fuel (TPS RDF).

RDF, imbuhnya, merupakan hasil dari sampah domestik yang diolah dengan metode biodyring untuk dijadikan energi terbarukan dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Pemanfaatan sampah tersebut mampu mensubstitusi penggunaan batu bara menjadi bahan bakar hingga 3% substitusi energi panas (thermal substitution rate/TSR)

"Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PT SBI ini dan berharap apa yang sudah dilakukan dapat dikembangkan lebih luas, sehingga permasalahan sampah yang ada saat ini dapat kita selesaikan," kata Rofik

Rofik mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja spesifik bersama Komisi VII DPR RI ke Pabrik Narogong-PT SBI Tbk Citeureup Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/03/2021).

"Saat ini permasalahan sampah menjadi perhatian semua pihak. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, total volume sampah yang diproduksi menjadi lebih dari 67 juta ton

per tahun, dan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan populasi dan ekonomi," urainya.

Legislator asal Kabupaten Purbalingga itu menambahkan, tentu pengolahan sampah menjadi RDF (Refused Derived Fuel) dapat menjadi salah satu solusi alternatif dan bisa menjadi sumber bahan bakar baik untuk pabrik semen ataupun industri yang lainnya (PLTU).

"Kami mewakili Dapil VII Jateng yang sangat dekat dengan Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara. Ini bisa berkolaborasi, daerah-daerah kami ada potensi. Besar harapan kami ini bisa menjadi kajian khusus PT SBI Tbk. Apa yang perlu diarahkan oleh pemerintah daerah," katanya.

Bagaimana pola kerja sama antara pemerintah daerah dengan PT SBI Tbk dan Indonesia Power. "Perlu tahapan bagaimana agar daerah kami bisa dijadikan pilot project," tanyanya.

Rofik merasa tertarik karena PT SBI telah memanfaatkan sampah



## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Saat ini permasalahan sampah menjadi perhatian semua pihak. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, total volume sampah yang diproduksi menjadi lebih dari 67 juta ton per tahun, dan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan populasi dan ekonomi,"

perkotaan sebagai bahan bakar alternatif dalam pembuatan semen lewat fasilitas pengelolaan sampah terpadu RDF di TPA Jeruklegi, Cilacap.

"Selain Pabrik Narogong Jawa Barat, penggunaan bahan bakar alternatif juga telah digunakan di PT Semen Padang

di Sumatera Barat, PT Semen Tonasa di Sulawesi Selatan, SMCB Pabrik Cilacap, PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Aceh serta Pabrik Tuban Jawa Timur," ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# KPI Larang Tampilkan Dai dari Organisasi Terlarang, Anggota FPKS: **Offside!**

**KUTIPAN**

Jakarta (23/03) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengkritik Surat Edaran KPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadan.

Bukhori menyoroti poin 6 Ketentuan Pelaksanaan huruf (d) seperti dikutip dari SE KPI Nomor 2 Tahun 2021;

"Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini mengganggap KPI telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga negara yang independen sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Alhasil, Bukhori memperingatkan lembaga ini untuk menempatkan fungsinya sesuai

proporsi yang semestinya.

"KPI tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan. Kewenangan KPI berada pada wilayah etis, bukan pada wilayah politis. Jadi, jangan offside!" tegasnya.

Terkait frasa organisasi terlarang, kendati tidak disebutkan secara detil dalam surat edaran tersebut, Komisioner KPI Irsal Ambia membenarkan FPI dan HTI masuk dalam ketentuan tersebut saat CNN Indonesia mengonfirmasikan pada Senin (22/3/2021).

Lebih lanjut, Anggota Badan Legislasi ini khawatir surat edaran ini berpotensi membentuk opini yang bias di tengah masyarakat sehingga memicu pembelahan sosial akibat munculnya stigmatisasi terhadap dai/pendakwah

tertentu melalui edaran tersebut.

"Dasar penilaian yang objektif menekankan pada gagasan spiritual dan rasionalitas yang dibawa oleh dai, bukan pada latar belakang kelompok/organisasi mereka," terang Bukhori.

Sementara di sisi lain, demikian Bukhori melanjutkan, pelarangan oleh pemerintah terhadap organisasi itu seharusnya dipahami oleh KPI dalam konteks pencabutan hak kebebasan organisasinya untuk beroperasi, bukan hak individunya. Artinya, individunya tetap memiliki hak untuk berbicara, apalagi untuk berdakwah, sambungannya.

"Hak berbicara, mengeluarkan pendapat tidak boleh dihalang sepanjang konten atau isi pembicaraannya tidak bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai keagamaan serta tidak mengandung unsur adu domba maupun fitnah," imbuhnya.

"Apakah KPI ini hendak menghambat penegakan HAM dengan menghalang orang untuk berbicara? KPI semestinya bisa lebih cermat



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

**"Pelarangan oleh pemerintah terhadap organisasi itu seharusnya dipahami oleh KPI dalam konteks pencabutan hak kebebasan organisasinya untuk beroperasi, bukan hak individunya. Artinya, individunya tetap memiliki hak untuk berbicara, apalagi untuk berdakwah"**

dalam melihat fakta sosiologis masyarakat kita yang tidak hanya terdiri dari satu golongan/aliran keagamaan semata. Karena itu, saya minta

bisa dipertimbangkan kembali opsi untuk merevisi edaran tersebut sebelum menimbulkan konsekuensi serius di kemudian hari," pungkasnya

# Legislator PKS: Vaksin Covid-19 Harus Dipastikan Kehalalannya

**KUTIPAN**

Untuk penentuan apakah manfaatnya lebih besar, lanjut Surahman, daripada kemudharatannya tidak boleh ditentukan oleh perorangan, tapi hanya boleh dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas di masyarakat

Jakarta (22/03) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan penggunaan vaksin buatan AstraZeneca yang mengandung babi karena alasan kedaruratan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat menyatakan, kehalalan dari vaksin harus menjadi prioritas utama.

"Karena halal mengandung makna nihilal yang artinya terbebas dari berbagai kemudharatan, seperti kemudharatan fisik, moral, harta, pikiran dan lain-lain," terang Surahman.

Lebih lanjut Anggota DPR dari PKS ini mengatakan kalau suatu makanan atau obat mengandung unsur yang haram meskipun hanya sedikit maka

statusnya tetap haram.

"Sebagaimana berdusta atau maksiat lainnya hukumnya sama haram, baik dilakukan hanya satu kali maupun berkali-kali, bahkan untuk sekedar mendekatinya saja sudah dilarang. Sekalipun tentu kemaksiatan yang dilakukan secara berulang lebih besar dosanya," papar Ketua Dewan Syariah Pusat PKS ini.

Demikian juga dalam hal mencuri, imbuhnya, antara mencuri seekor ayam dengan korupsi dana bansos covid yang jumlahnya trilyunan rupiah sama hukumnya, yaitu haram.

"Yang tentunya korupsi dana bansos lebih besar dosanya dan lebih berat hukumannya," tambah Surahman.

Lalu Surahman

menerangkan, Jika suatu benda terbebas dari semua unsur yang haram, maka dia akan menjadi thayyib (baik) dan memberi manfaat bagi kesehatan, moral, ekonomi dan sendi kehidupan lainnya hingga lahir darinya berbagai keberkahan.

Terkait dengan vaksin AstraZeneca yang dibolehkan oleh MUI, maka kedaruratannya harus ditimbang secara rasional, antara besarnya mudharat dengan manfaat yang diterima. Kemudharatan baru bisa dipertimbangkan jika benar-benar mengancam jiwa. Di samping itu dalam pemakaiannya pun harus benar-benar dalam batas minimum demikian juga waktu pemakaiannya," urai Surahman.

Untuk penentuan apakah manfaatnya lebih besar, lanjut Surahman, daripada kemudharatannya tidak boleh ditentukan oleh perorangan, tapi hanya boleh dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas di masyarakat.

"Untuk itu saya mendesak agar MUI dan BPJPH lebih pro aktif dalam mengontrol kehalalan semua vaksin yang telah ditetapkan pemerintah," tutup Surahman.



**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kalau suatu makanan atau obat mengandung unsur yang haram meskipun hanya sedikit maka statusnya tetap haram. Sebagaimana berdusta atau maksiat lainnya hukumnya sama haram, baik dilakukan hanya satu kali maupun berkali-kali, bahkan untuk sekedar mendekatinya saja sudah dilarang. Sekalipun tentu kemaksiatan yang dilakukan secara berulang lebih besar dosanya"

# Politisi PKS Minta Pemerintah **Pastikan** Tak Ada Obat Titipan dalam Daftar Fornas

## KUTIPAN

Jakarta (24/03) — Komisi IX DPR RI bersama pihak terkait membahas Formulirium Nasional (Fornas), yaitu daftar obat terpilih yang digunakan sebagai acuan penulisan resep dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta pemerintah agar penyusunan Fornas dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada obat titipan yang masuk untuk kepentingan bisnis.

"Fornas disusun sebagai acuan penulisan resep obat dalam JKN sehingga ada pengendalian mutu obat dan biaya pengobatan yang berdampak pada optimalisasi pelayanan pada pasien. Oleh karena itu daftar obat yang masuk fornas harus benar-benar obat terpilih yang paling berkualitas, aman dan harga terjangkau. Tidak boleh ada

obat titipan yang masuk untuk kepentingan bisnis atau lainnya. Jadi Fornas harus transparan dan bertanggung jawab dalam prosesnya agar rakyatlah yang paling diuntungkan, bukan yang lain," ujar Netty dalam keterangan media, Rabu (24/03)

Fornas, kata Netty, dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menyusun perencanaan pengadaan obat dan alat kesehatan secara e-katalog agar kebutuhan lapangan terpenuhi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

"Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan e-katalog dalam proses pengadaan obat guna

menghindari kekosongan ketersediaan obat serta memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan obat yang tercover BPJS dan obat lainnya. Dengan e-katalog diharapkan masyarakat tidak lagi dibebani dengan obat-obat yang tidak dicover BPJS," katanya.

Selain itu, menurut Netty, Fornas seharusnya meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan Kemenkes tahun 2021.

"Kemenkes menerima anggaran sebesar Rp169,7 triliun untuk alokasi vaksin, penanganan Covid-19, obat-obatan dan alat kesehatan. Anggaran ini harus dioptimalkan untuk menjamin peningkatan pelayanan kesehatan pada rakyat, termasuk dalam hal ketersediaan obat bagi peserta BPJS," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan obat untuk penyakit katastrofik yang masih tinggi penderitanya.

"Jumlah penderita penyakit katastrofik seperti jantung,



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

**"Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan e-katalog dalam proses pengadaan obat guna menghindari kekosongan ketersediaan obat serta memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan obat yang tercover BPJS dan obat lainnya. Dengan e-katalog diharapkan masyarakat tidak lagi dibebani dengan obat-obat yang tidak dicover BPJS"**

kanker, stroke, gagal ginjal dan talasemia masih tinggi.

Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi dengan risiko kematian tinggi sehingga membutuhkan biaya pengobatan besar. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjamin ketersediaan obatnya

agar pasien dapat terlayani dengan baik," terang Netty.

Terakhir, Netty menyoroti masih kurangnya daftar produk yang tergolong herbal standar dan fitofarmaka dalam e-katalog obat-obatan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Korban PHK Gagal Dapat Jaminan BPJS, Aleg PKS: Kendala dalam Sistem Harus Segera diselesaikan

## KUTIPAN

Jakarta, (23/03) --- Anggota DPR RI Dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menerima aspirasi mengenai hilangnya hak pekerja memperoleh pelayanan BPJS Kesehatan.

Dalam aspirasi tersebut, Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Eenergi dan Pertambangan Kab/Kota Bekasi mengadukan bahwa para pekerja yang terkena PHK akibat Pandemi Covid-19 tidak mendapat jaminan Kesehatan dari BPJS. Padahal, seluruh persyaratan dokumen sudah dilengkapi mengacu pada Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menanggapi masukan tersebut, Anggota Komisi IX FPKS DPR RI Mufida mengatakan bahwa Komisi IX akan berkomunikasi secepatnya dengan tataran BPJS Kesehatan yang baru, mengingat baru terjadinya pergantian di pusat.

"Memang di tataran BPJS Kesehatan baru terjadi pergantian di pusat untuk Direksi dan Dewan

Pengawasnya. Maka Insya Allah kita akan coba komunikasikan melalui BPJS Kesehatan hambatan yang ada di mana supaya bisa segera diselesaikan." Tutur Mufida.

Diketahui bahwa pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia telah terdaftar secara terpusat di BPJS Kesehatan Cabang Karawang, namun BPJS Karawang menyampaikan bahwa belum ada kejelasan mengenai SOP tentang PBI-JK untuk pekerja PHK.

BPJS Karawang masih akan melakukan koordinasi dengan wilayah bandung dan masih menunggu adanya respon. BPJS Karawang juga baru mengetahui adanya fatwa dari Kemaker mengenai pekerja yang terkena PHK sebagai penerima PBI-JK. Mufida mengatakan

bahwa kendala dalam sistem tersebut harus segera dipertemukan dan diselesaikan.

"Sistem online pada BPJS Kesehatan menganggap yang bersangkutan menunggak, karena tidak ada pembayaran lagi. Ini yang harus dipertemukan karena ada kendala di sistem. Akhirnya terjadi semacam kontradiksi di lapangan akibat dari adanya kebijakan bahwa dalam UU BPJS. luran selama 6 bulan setelah PHK itu ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk PBI, apakah sudah masuk ke PBI atau belum. Kita akan coba tanyakan lagi secara lebih detail ke direksi yang baru dan juga dewan BPJS Kesehatan yang baru." Ungkap Mufida.

Mufida juga menegaskan bahwa analisis mengenai implementasi Perpres No. 82 Tahun 2018 pasal 27 Ayat 1 tentang Jaminan Kesehatan masih harus diklarifikasi lebih detail.

"Kita akan coba komunikasikan secara informal baik dengan direksinya maupun sebagai penerima PBI-JK. Tutup Mufida.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Sistem online pada BPJS Kesehatan menganggap yang bersangkutan menunggak, karena tidak ada pembayaran lagi. Ini yang harus dipertemukan karena ada kendala di sistem. Akhirnya terjadi semacam kontradiksi di lapangan akibat dari adanya kebijakan bahwa dalam UU BPJS.



**PKS**

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# WORLD AUTISM DAY 2 APRIL

**Autism** is not a disease.  
Don't try to cure  
us. Try to unders  
tand us

**Hj. Ledia Hanifa A,  
S.Si., M.Psi.T**

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Anggota FPKS: Pemerintah Harus Bersikap Jelas Siapa Tanggung Gaji Guru P3K

## KUTIPAN

Jakarta (24/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menyoroti persoalan dan permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih banyak, di antaranya adalah persoalan guru. Persoalan guru adalah persoalan panggilan hati.

Menurut Sakinah, para guru yang sudah mengabdikan lebih dari 10 tahun adalah karena panggilan hati untuk ikut serta mencerdaskan bangsa.

"Kita sudah sering mendengar bagaimana persoalan yang sangat polemik, dimana persoalan guru ialah panggilan hati, mereka yang sudah mengabdikan selama ini adalah panggilan hati.

Pengabdian lima tahun, sepuluh tahun bahkan ada yang berusia 58 tahun masih menjadi guru honor. Ini sungguh memprihatinkan, kita yang ada di ruangan ini dan tentunya ini semua berangkat dari guru, berada disini karena asbab dari guru. Sehingga persoalan guru yang demikian majemuk, yang demikian polemik menjadi skala prioritas bagi kita untuk

dituntaskan," ungkap Sakinah saat rapat dengar pendapat Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honoror menjadi ASN dengan sejumlah perwakilan pemerintah daerah di ruang Komisi X DPR RI, Selasa (23/03/2021).

Lebih lanjut, politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengungkapkan, persoalan guru honoror ini ibarat penyakit kanker stadium empat.

"Yang disampaikan dari Banten, bahwa mereka mendengar adanya rekrutmen PPPK ini seperti hujan di tengah hari, berharap diangkat menjadi ASN. Bayangkan Banten yang dua setengah jam dari kota Jakarta saja mengeluh. Kita bisa bayangkan bagaimana yang di NTT, Papua, Kalimantan,

Sulawesi Tengah yang merupakan daerah 3T. Bisa kita bayangkan bagaimana prihatinnya mereka, bahkan mereka mengatakan janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi," terang Sakinah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mendesak pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis dan jelas, disampaikan kepada pemerintah daerah tentang skema pengajian guru PPPK yang diangkat menjadi ASN.

"Sehingga, kita mengharapkan pemerintah cepat dan tepat dalam menyelesaikan ini. Kenapa saya katakan cepat, karena sekarang ada polemik di tengah-tengah pemerintah daerah. Apakah benar gaji guru PPPK akan dibayarkan melalui anggaran APBN," kata anggota BKSAP.

Sakinah pun menyampaikan masih terdapat pemetingan daerah yang masih ragu sumber pembiayaan gaji guru PPPK.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

"Kita sudah sering mendengar bagaimana persoalan yang sangat polemik, dimana persoalan guru ialah panggilan hati, mereka yang sudah mengabdikan selama ini adalah panggilan hati. Pengabdian lima tahun, sepuluh tahun bahkan ada yang berusia 58 tahun masih menjadi guru honor. Ini sungguh memprihatinkan, kita yang ada di ruangan ini dan tentunya ini semua berangkat dari guru, berada disini karena asbab dari guru. Sehingga persoalan guru yang demikian majemuk, yang demikian polemik menjadi skala prioritas bagi kita untuk dituntaskan."

# Aleg PKS: Realokasi Anggaran di Kemenpora Seharusnya untuk Pemberdayaan Pemuda

## KUTIPAN

Jakarta (24/03) --- Untuk mendukung penanganan dampak pandemi maka anggaran dari Kementerian dan Lembaga masih mengalami refocusing dan realokasi di Tahun Anggaran 2021.

Tak ketinggalan dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menghasilkan pemotongan anggaran sebesar 322 Milyar.

Meski bisa memahami dan mengapresiasi kegiatan refocusing dan realokasi anggaran dari Kementerian dan Lembaga di tengah masa pandemi yang belum berakhir ini namun Anggota Komisi X DPR RI mengkritisi kemana realokasi anggaran tersebut dialihkan.

Dalam rapat kerja bersama Menpora hari Selasa (23/3) lalu, Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan bahwa pemotongan anggaran itu semuanya dikumpulkan ke Kementerian Keuangan. "Padahal kan Kementerian

ini namanya saja sudah Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada faktor pemudanya, yang merupakan bagian dari bangsa ini, dan kelak menjadi para pewaris negeri. Karena itu sepatutnya, nasib mereka diperhatikan betul oleh Kemenpora sehingga anggaran pemotongan semestinya bisa dialihkan, direlokasi untuk mendukung pemberdayaan para pemuda," kata Aleg Fraksi PKS ini pula.

Menurut Undang-undang no 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan, siapa yang disebut pemuda adalah mereka yang berusia dalam rentang 16 hingga 30 tahun. Dan berdasarkan data statistik BPS, pada tahun 2020, ada sekitar

64 juta pemuda di Indonesia, atau dengan kata lain, 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda.

"Ini adalah jumlah yang luar biasa. Tak heran bila kita akan meraih bonus demografi salah satunya dengan besaran jumlah para pemuda ini. Karenanya untuk menjamin kualitas bangsa Indonesia masa datang menjadi lebih baik, kuat dan berjaya, kita perlu dengan sangat sungguh-sungguh memperhatikan para pemuda ini. Diantaranya memikirkan nasib mereka yang juga terpuruk akibat pandemi," tegas Ledia

Anggaran bagi Kemenpora ada selama ini memang kecil, hanya di kisaran 2,2 Triliun Rupiah. Dari angka itu Program Dukungan Manajemen mendapat porsi anggaran di kisaran 315 Milyar, Program Keolahragaan mendapat 1,8T dan Program Kepemudaan mendapat hanya sekitar 118 Milyar.

"Jadi memang anggaran bagi Program Kepemudaan itu kecil sekali, hanya sekitar 118 Milyar untuk mengurus 64 juta pemuda. Karena itu saya



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

“Pemotongan anggaran itu semuanya dikumpulkan ke Kementerian Keuangan. Padahal kan Kementerian ini namanya saja sudah Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada faktor pemudanya, yang merupakan bagian dari bangsa ini, dan kelak menjadi para pewaris negeri”

mengusulkan kepada Kemenpora, ketika ada refocusing, realokasi anggaran dari Program Keolahragaan, yang jumlah potongannya mencapai 322 Milyar itu

sebaiknya dialihkan atau dialihkan sebagian untuk program pemberdayaan pemuda,” papar Ledia. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Kunker Komisi XI, Junaidi Tekankan Program KUR Harus Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat

## KUTIPAN

legislator Fraksi PKS ini menyoroti sudah sejauh mana kegiatan dan program dari pemerintah yang dilaksanakan oleh BI, OJK, dan Himbara sebagai penyalur KUR betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Surakarta (25/03) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly menekankan kepada Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar program pemerintah betul-betul dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Dalam menyelenggarakan setiap kegiatan dan program pemerintah harus melakukannya secara konkret, riil, nyata, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Junaidi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI

di Kota Surakarta, Kamis (25/03)

Masa pandemi yang belum berakhir, lanjut Junaidi, upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus terus dioptimalkan.

Oleh karenanya, legislator Fraksi PKS ini menyoroti sudah sejauh mana kegiatan dan program dari pemerintah yang dilaksanakan oleh BI, OJK, dan Himbara sebagai penyalur KUR betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, Politisi asal Lampung ini juga mendorong kepada Pemerintah Daerah (Pemda) kota Solo untuk mengevaluasi pelaksanaan KUR. Karenanya ia menanyakan kendala apa saja yang dirasakan masyarakat Solo dalam proses pengajuan KUR selama pandemi ini.

"Kemudahan syarat dan tingkat suku bunga yang rendah dalam penyaluran KUR untuk pelaku UMKM perlu diperhatikan sehingga program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas," tutup Junaidi.



**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI

"Dalam menyelenggarakan setiap kegiatan dan program pemerintah harus melakukannya secara konkret, riil, nyata, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masa pandemi yang belum berakhir, lanjut Junaidi, upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus terus dioptimalkan."

# RUU PPSK Masuk Prolegnas 2021, Aleg PKS Beri Sejumlah Catatan

## KUTIPAN

Jakarta (19/03) — RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah disepakati untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

RUU ini akan mengatur hal-hal yang komprehensif terkait reformasi, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan sebagai penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan, penguatan koordinasi, dan mekanisme penanganan sektor jasa keuangan.

Aturan tersebut akan merevisi sejumlah undang-undang terkait sektor keuangan, seperti UU Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menteri Keuangan menyebutkan, produk hukum tersebut akan meliputi pengaturan atau pembaruan regulasi di sektor pasar modal, perbankan, lembaga non bank, lembaga keuangan lainnya hingga sektor keuangan digital.

Menanggapi kehadiran RUU PPSK ini, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya. Anis menyatakan bahwa pada dasarnya RUU PPSK tidak urgen untuk saat ini.

Anis menyampaikan sejumlah alasan. Pertama, konten dari RUU PPSK lebih kepada upaya-upaya menggerogoti independensi bank sentral.

"Kami pikir ini sangat berbahaya karena independensi tersebut menjadi syarat suatu kebijakan menjadi kredibel di pasar, baik di dalam maupun di luar negeri," ujarnya.

Dampak lanjutan dari kotak-katik independensi bank sentral dapat berujung pada berbagai hal terutama depresiasi rupiah.

Anis menambahkan, perlu diingat juga bahwa depresiasi rupiah yang mendalam berdampak buruk bagi perekonomian baik bagi pelaku industri maupun Pemerintah (dalam bentuk lonjakan cicilan utang maupun bunganya).

Selain itu, kerentanan depresiasi rupiah bakal meningkat karena masih tingginya porsi kepemilikan aset asing di dalam negeri baik dari pasar saham (sekitar 45 persen) maupun pasar obligasi (sekitar 30 persen). "Jadi, tolong jangan gegabah soal RUU ini," tandasnya.

Kedua, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini melihat, persoalan yang dihadapi oleh sektor keuangan Indonesia saat ini lebih kepada rendahnya peranan sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.

"Beberapa rasio sudah mengonfirmasi hal tersebut seperti rasio M2/PDB maupun rasio kredit terhadap PDB. Data-data tersebut tidak lebih dari 40 persen. Artinya peranan sektor keuangan di Indonesia sangat dangkal," kata Anis.

Hal inilah, lanjut Anis, yang menjadi penyebab daya saing ekonomi rendah. Banyak hal yang menyebabkan kondisi tersebut seperti ridigital suku bunga perbankan (penurunan bunga acuan disrespon lambat oleh suku bunga perbankan) hingga struktur pasar oligopoli. "Hal-hal ini jauh dari persoalan yang diangkat oleh RUU ini,"



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

"konten dari RUU PPSK lebih kepada upaya-upaya menggerogoti independensi bank sentral. Kami pikir ini sangat berbahaya karena independensi tersebut menjadi syarat suatu kebijakan menjadi kredibel di pasar, baik di dalam maupun di luar negeri"

paparnya.

Ketiga, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyatakan bahwa revisi regulasi di saat kondisi tidak normal (pandemi) bisa

berdampak buruk terhadap persepsi pasar. Apalagi yang dasar adalah bank sentral.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# Interupsi di Paripurna, Ansory PKS: Segera Wujudkan Vaksin Nusantara, Hindari Xenocentrism

## KUTIPAN

Jakarta (24/03) --- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar memberi sejumlah catatan mengenai progres vaksinasi dan produksi vaksin nusantara dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/03).

"Interupsi saya ini saya beri judul 'Segera Wujudkan Vaksin Nusantara, Hindari Xenocentrism'. Xenocentrism itu membanggakan produk bangsa lain daripada produk bangsa sendiri, bahkan ada yang bilang membenci produk sendiri dan membanggakan produk lain, jadi hindari ya," ujarnya.

Legislator asal Dapil Sumatera III tersebut mengingatkan beberapa hal yang telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya Presiden RI Joko Widodo sudah pernah memanggil Menteri Keuangan untuk membantu mewujudkan vaksin nusantara atau vaksin produk anak bangsa. Yang kedua adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 6

Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

"Ini udah ada Inpres-nya ya. Mengingat yang ketiga, juga impian DPR RI, saya kira hampir semua mendukung, terutama yang saya lihat di media itu bapak Aziz Syamsuddin, ini yang ketiga, jadi pimpinan DPR RI juga, saya apresiasi juga ya kepada pimpinan DPR RI. Kemudian mengingat yang keempat, masih banyak, dan saya ketemu juga banyak dokter-dokter senior atau tenaga-tenaga kesehatan juga pakar-pakar yang belum mau divaksin dengan vaksin yang sekarang, mereka menunggu vaksin nusantara," jelasnya. Pengusul RUU Larangan

Minuman Beralkohol itu juga menerangkan, yang kelima adalah kesimpulan Rapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Riset dan Teknologi RI, Kepala Badan Riset Nasional (BRIN), Kepala Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI, dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pada tanggal 10 Maret 2021.

"Yang pertama Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI untuk terus mendukung dan melakukan pendampingan terhadap pengembangan kandidat vaksin merah putih, dengan tetap memperhatikan persyaratan wajib dalam proses pengembangan vaksin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan demi memastikan khasiat, mutu, dan keamanannya," lanjut Ansory.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**H. ANSORY SIREGAR, Lc.,**  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Ini udah ada Inpres-nya ya. Mengingat yang ketiga, juga impian DPR RI, saya kira hampir semua mendukung, terutama yang saya lihat di media itu bapak Aziz Syamsuddin, ini yang ketiga, jadi pimpinan DPR RI juga, saya apresiasi juga ya kepada pimpinan DPR RI. Kemudian mengingat yang keempat, masih banyak, dan saya ketemu juga banyak dokter-dokter senior atau tenaga-tenaga kesehatan juga pakar-pakar yang belum mau divaksin dengan vaksin yang sekarang, mereka menunggu vaksin nusantara

# Anggota Baleg FPKS: Tarik RUU Ibukota Negara, Fokus Penyelesaian Penanganan Pandemi Covid-19

## KUTIPAN

Ledia menyangkan di tengah pandemi yang masih berlangsung dan beban keuangan negara yang terus bertambah, RUU tentang Ibukota Negara yang diusulkan oleh pemerintah masuk ke dalam 33 Prolegnas yang akan dibahas.

Jakarta (24/03) — Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengomentari keputusan pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan Perubahan atas Prolegnas 2020-2024 tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibukota Negara saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/03).

“Kami mengapresiasi bahwa pada hari ini kita telah mengambil keputusan tentang Prolegnas Prioritas tahun 2021 dan juga Perubahan atas Prolegnas pada tahun 2020-

2024, hanya saja tadi kami mengira bahwa segala catatan yang diberikan oleh masing-masing fraksi dibacakan pada hari ini, namun nampaknya ternyata tidak dibacakan,” ungkapnya.

Ledia menyangkan di tengah pandemi yang masih berlangsung dan beban keuangan negara yang terus bertambah, RUU tentang Ibukota Negara yang diusulkan oleh pemerintah masuk ke dalam 33 Prolegnas yang akan dibahas.

“Saya ingin menyampaikan dua catatan kami saja yang

berkaitan dengan Prolegnas Prioritas ini, karena pada kondisi pandemi yang sekarang ini masih belum diketahui kapan selesainya dan beban keuangan negara kita yang luar biasa, kami memberikan catatan agar pada saat ini kita jangan dulu membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara,” lanjutnya.

Ledia juga menegaskan kepada pemerintah agar RUU tentang Ibukota Negara ditarik dan lebih fokus pada penyelesaian urusan-urusan yang membebani masyarakat.

“Kami mencatatkan agar sebaiknya ditarik oleh pemerintah agar nanti kita lebih fokus pada pembahasan tentang Undang-Undang yang lebih fokus kepada penyelesaian urusan-urusan yang sangat terasa oleh masyarakat, sebagaimana juga Undang-Undang maupun juga Undang-Undang tentang Obat dan Makanan.” tutupnya.



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Badan Legislasi DPR RI

“Saya ingin menyampaikan dua catatan kami saja yang berkaitan dengan Prolegnas Prioritas ini, karena pada kondisi pandemi yang sekarang ini masih belum diketahui kapan selesainya dan beban keuangan negara kita yang luar biasa, kami memberikan catatan agar pada saat ini kita jangan dulu membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara”

## Perjuangkan Nasib Guru Honorer, Politisi PKS Minta Perpres 98 tahun 2020 Diubah

### KUTIPAN

Jakarta (23/03) --- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menyoroti masalah guru honorer dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar Selasa, (23/03/2021).

Menurut Fikri, Perpres 98 tahun 2020 sebaiknya diubah dan kalau perlu SKB Empat Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.

"Melalui forum yang terhormat ini, kami meminta kepada pimpinan Dewan agar mengubah Perpres 98 tahun 2020 bahkan kalau perlu mengganti SKB Empat Menteri", ungkap Fikri.

Sebelumnya Fikri menjelaskan bahwa saat ini Pemda sedang tidak percaya dengan Pemerintah pusat karena rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (P3K) dibiayai Pemerintah Daerah.

"Sekarang ini terjadi pemda baik Provinsi maupun Kabupaten Kota sedang tidak percaya pada pemerintah pusat. Apa sebabnya? karena rekrutmen yang lalu 34.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ternyata dibiayai sepenuhnya oleh APBD. Akibatnya Kemenpan RB dan Mendikbud yang mengumumkan 2021 merekrut 1 juta guru P3K hingga sekarang baru 568.000," papar Fikri.



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Sekarang ini terjadi pemda baik Provinsi maupun Kabupaten Kota sedang tidak percaya pada pemerintah pusat. Apa sebabnya? karena rekrutmen yang lalu 34.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ternyata dibiayai sepenuhnya oleh APBD. Akibatnya Kemenpan RB dan Mendikbud yang mengumumkan 2021 merekrut 1 juta guru P3K hingga sekarang baru 568.000"

## Pemerintah dan DPR diminta Bersuara **Hentikan Kudeta di Myanmar**

KUTIPAN

Jakarta (23/03) --- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta meminta DPR dan pemerintah bergandengan tangan,

Mengambil sikap tegas bersuara agar kudeta yang tengah terjadi di Myanmar segera dihentikan.

"Kami menghimbau DPR sebagai lembaga dan kepada pemerintah untuk bersama-sama menyuarkan agar proses kudeta di Myanmar segera dihentikan dan rezim kudeta itu segera menghentikan aksinya, dan mengembalikan negara Myanmar ke dalam proses demokrasi," tegasnya dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/03).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam tersebut menyerukan agar pemerintah Indonesia mengambil inisiatif dalam upaya penggalangan persatuan negara-negara ASEAN terkait kasus kudeta ini, agar tak mempengaruhi keberlangsungan demokrasi di negara-negara ASEAN.

"Kami berharap pemerintah Indonesia ini proaktif untuk menggalang pemerintah negara-negara ASEAN. Keruntuhan demokrasi di satu negara di ASEAN itu akan mempengaruhi stabilitas dan kualitas demokrasi di negara ASEAN," ujar Sukamta.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPLN) itu juga mengingatkan pemerintah dan DPR tentang jati diri Republik Indonesia di antara negara-negara ASEAN.

"Janglah sampai Indonesia yang selama ini dianggap sebagai the big brother terlihat tidak peduli, ketidakpedulian ini akan berpengaruh terhadap citra negara Indonesia, para pimpinan negara Indonesia, baik itu yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif," pungkas Sukamta.



**H. SUKAMTA, Ph.D.**  
Anggota Komisi I DPR RI

"Kami menghimbau DPR sebagai lembaga dan kepada pemerintah untuk bersama-sama menyuarkan agar proses kudeta di Myanmar segera dihentikan dan rezim kudeta itu segera menghentikan aksinya, dan mengembalikan negara Myanmar ke dalam proses demokrasi,"

## Singgung Kondisi Pangan Anggota FPKS Minta Impor Beras Dibatalkan

### KUTIPAN

Jakarta (23/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet meminta pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras.

Slamet mengatakan, situasi pangan Indonesia saat ini telah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga kebijakan impor beras akan semakin melemahkan petani dalam negeri.

"Mengapa pemerintah ini terus memaksakan impor? Padahal berdasarkan data-data yang ada, stok beras kita memadai," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, Selasa, 23 Maret 2021.

"Jangan sampai pemerintah kalah oleh mafia impor yang menari-nari di atas penderitaan rakyat," tegasnya.

Legislator asal Sukabumi ini menyinggung kondisi pangan Indonesia yang berada di bawah sejumlah negara Afrika.

Data Food Sustainability

Index tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 60 dari 67 negara yang diukur. Masih tertinggal oleh Ethiopia yang berada di posisi 27 dan Zimbabwe di urutan 31.

"Negara kita yang katanya agraris ini justru kalah oleh negara-negara di Afrika yang tidakabene sering kita anggap tidak memiliki sumber daya alam se-melimpah Indonesia," jelas Slamet.

Slamet juga menyinggung soal data Indeks Kelaparan Global tahun 2020, di mana Indonesia meraih skor 20,1 dan masuk ke dalam status negara yang alami kelaparan kronis.

"Dalam situasi seperti ini, kebijakan impor justru akan memperparah kondisi pangan Indonesia dan melemahkan perlindungan terhadap petani lokal," pungkas Slamet.



**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Situasi pangan Indonesia saat ini telah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga kebijakan impor beras akan semakin melemahkan petani dalam negeri. Mengapa pemerintah ini terus memaksakan impor? Padahal berdasarkan data-data yang ada, stok beras kita memadai. Jangan sampai pemerintah kalah oleh mafia impor yang menari-nari di atas penderitaan rakyat"



**FRAKSI PKS  
DPR RI**

# NKRI HARGA MATI

**MEMPERINGATI  
MOSI INTEGRAL NATSIR  
3 APRIL 1950**



PENGANTAR  
**Dr. H. Jazuli  
Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS  
DPR RI



NARASUMBER  
**Dr. HM. Hidayat  
Nurwahid, MA**  
Wakil Ketua  
MPR RI



NARASUMBER  
**H. Adian  
Husaini,  
Ph.D**  
Ketua Umum  
DDII



NARASUMBER  
**KH Dr. (Hc)  
Muhyiddin  
Junaidi**  
Ketua Lembaga Hubungan  
dan Kerjasama Internasional  
PP Muhammadiyah.  
Wakil Ketua Dewan  
Perimbangan MUI



NARASUMBER  
**Yudi Latif,  
Ph.D**  
Kepala BPIP (2018)  
Ketua Pusat Studi  
Islam dan Kene-  
garaan Indonesia

 **SABTU  
3 APRIL 2021**

 **PUKUL 13.30  
sd 16.00 WIB**

 **LIVE FACEBOOK  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**& YOUTUBE  
PKSTV  
DPR RI**

# MKD DPR Bangun Sinergi Dengan Parpol

## KUTIPAN

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Aboe Bakar Al Habsy memastikan MKD aktif membangun sinergi dengan berbagai partai politik (Parpol) untuk meminimalisir pelanggaran etika yang dilakukan para anggota DPR RI. MKD dan mahkamah partai harus berjalan seiring mencegah pelanggaran etika.

"Seminar ini merupakan upaya MKD untuk mendapatkan sinergi kelembagaan, karena tugas MKD sangat berat, tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi dengan berbagai stakeholder partai," katanya usai memberi sambutan pada Seminar Nasional MKD bertajuk 'Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik' di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Habib, begitu ia akrab disapa, ingin agar parpol juga bersinergi dengan MKD, mencegah terjadinya pelanggaran etika. Apalagi, hampir di setiap partai ada mahkamah atau dewan

kehormatannya juga. Jadi, bila ada dilema menyangkut pelanggaran etika anggota DPR yang juga anggota Parpol bisa diatasi bersama. "Di sinilah kami sinergi dengan partai politik untuk menjalankan tugas," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia melanjutkan, MKD mengundang semua Parpol peserta Pemilu untuk mendapatkan kesamaan pandang soal etika ini. Harapannya, Parpol bisa mendukung upaya pencegahan pelanggaran etika di lingkungan DPR RI. "Prinsipnya seminar ini wujud komitmen MKD untuk menegakkan etika di lembaga legislatif. Kegiatan ini juga untuk menjaga martabat dan keluhuran anggota DPR,"

tandas legislator asal Kalimantan Selatan tersebut.

MKD, lanjut Habib, punya fungsi yang berat. MKD tidak bisa bekerja sendiri. Karenanya, harus mendapat dukungan kelembagaan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran etika. Sedari awal lembaga Parpol juga harus membekali dan mengawasi kadernya, terutama yang duduk di parlemen. Saat ini, katanya, sudah banyak pengaduan yang masuk ke MKD dan akan diputuskan dengan mengacu ketentuan perundang-undangan.

"Dilihat dari namanya, MKD adalah lembaga peradilan yang punya fungsi dasar pengadilan atau memutus perkara. Dulu MKD pernah disebut Dewan Kehormatan (DK) lalu menjadi Badan Kehormatan (BK). MKD sekarang bersifat aktif, tidak hanya menunggu laporan atau pengaduan. Tapi kita melakukan upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran etika," tutup Anggota Komisi III DPR RI tersebut. (mh/sf)



**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**  
Ketua MKD DPR RI

"MKD punya fungsi yang berat. MKD tidak bisa bekerja sendiri. Karenanya, harus mendapat dukungan kelembagaan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran etika. Sedari awal lembaga Parpol juga harus membekali dan mengawasi kadernya, terutama yang duduk di parlemen. Saat ini, sudah banyak pengaduan yang masuk ke MKD dan akan diputuskan dengan mengacu ketentuan perundang-undangan."



*Mari Tetap*  
**Patuhi** Protokol  
*Kesehatan*

# Kunjungi Dapil, Netty Ajak Wanita PUI Komitmen Jaga NKRI dan Ketahanan Keluarga

## KUTIPAN

Cirebon (22/03) — Semakin maraknya upaya mengganggu integrasi Indonesia, Netty Prasetiyani mengajak masyarakat yang tergabung dalam organisasi Wanita PUI untuk menjadi garda terdepan dalam membangun semangat nasionalisme dan menjaga NKRI.

"Saya sangat yakin dan tidak ragu bahwa Persatuan Umat Islam (PUI) termasuk elemen bangsa yang sangat mencintai Indonesia dan tidak diragukan kiprahnya baik di bidang pendidikan maupun keumatan. Maka, saya mengajak PUI dan Wanita PUI untuk jadi yang terdepan menjaga NKRI", ungkap Netty dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Wanita PUI di Kota Cirebon (21/03).

Indonesia sudah sejak lama hidup damai dan berdamai dengan kebhinekaan baik suku, ras maupun agama. "Intoleransi dan radikalisme harus kita perangi

sejak dini dan dari lingkup terkecil. Salah satu upayanya adalah dengan terus menggaungkan 4 pilar ini ke seluruh elemen masyarakat", ungkap tokoh Perempuan Jawa Barat ini.

Ketua Dewan Pakar Wanita PUI ini menegaskan bahwa Persatuan Umat Islam (PUI) adalah organisasi gerakan yang sejak dulu mencintai repu-zblik ini dan ikut serta memperjuangkan kemerdekaan.

Oleh karena itu, Netty berharap besar pada PUI dengan semangat mahabbah syi'aruna & gerakan Islam wasathon, PUI dan wanita PUI harus tampil di tingkat lokal

maupun nasional dan berkontribusi pada masyarakat.

"Oleh karenanya, PUI bisa menjadi elemen bangsa dalam mencegah racun intoleransi dan radikalisme di Indonesia", tambah anggota MPR RI Fraksi PKS dapil Jabar 8 meliputi Kota Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu ini.

Pada kesempatan ini, anggota Komisi IX DPR RI ini, mengajak secara khusus Wanita PUI untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan upaya promotif dan preventif kesehatan dan ketahanan keluarga.

"Hak kesehatan rakyat sejatinya tanggung jawab utama pemerintah, tapi masyarakat kita masih menghadapi berbagai masalah kesehatan, seperti gizi buruk, stunting, kesulitan akses layanan kesehatan dan banyak lagi. Mari Ibu-ibu dan calon ibu dari Wanita PUI bisa bergotong royong mengedukasi dan mengkampanyekan hidup bersih dan sehat sehingga ketahanan keluarga dapat terwujud," ujar Netty mengakhiri.



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Hak kesehatan rakyat sejatinya tanggung jawab utama pemerintah, tapi masyarakat kita masih menghadapi berbagai masalah kesehatan, seperti gizi buruk, stunting, kesulitan akses layanan kesehatan dan banyak lagi. Mari Ibu-ibu dan calon ibu dari Wanita PUI bisa bergotong royong mengedukasi dan mengkampanyekan hidup bersih dan sehat sehingga ketahanan keluarga dapat terwujud"

# Kunjungi Dapil, Junaidi Auly Serahkan Bantuan Kursi Roda

**KUTIPAN**

Lampung (21/3) — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II Junaidi Auly dalam kunjungannya ke Lampung Tengah menyerahkan 2 buah kursi roda yang sangat dibutuhkan untuk warga Lanjut Usia (Lansia).

"Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga kepada kami bahwa ada lansia dan warga yang sedang sakit yang membutuhkan kursi roda," ujar Junaidi dalam kegiatan Kunjungan Dapil di Lampung Tengah. Minggu, (21/03)

Sang penerima, ibu Yaminem (88 tahun) warga Desa Simpang Agung, Seputih Agung dan Nur Agustina (50 tahun) warga Mataram Ilir, Seputih Surabaya, Lampung Tengah menyampaikan terima kasih kepada bapak Junaidi atas diberikan bantuan berupa kursi roda. Nenek Yaminem juga mengatakan bahwa bantuan ini sangat ia butuhkan karena faktor uzur, sedangkan Ibu Nur Agustina sedang sakit yang juga

membutuhkan bantuan ini.

Politisi Fraksi PKS ini langsung hadir menyerahkan bantuan kursi roda sebagai komitmen mengadvokasi aspirasi masyarakat. Ia berharap bantuan ini bisa bermanfaat dan membantu agar bisa beraktivitas di lingkungan rumah.

"Dengan kursi roda ini jadi setiap pagi ibu bisa dibawa keluar agar terkena sinar matahari dan dapat menghirup udara segar," kata Junaidi.

Bang Jun, sapaan akrabnya menegaskan bahwa kegiatan ini bisa terus dilakukan jika ada aspirasi dari masyarakat yang membutuhkan. Kami berupaya untuk terus bersama rakyat demi hadirnya kesejahteraan masyarakat.



**Ir. H. A. JUNAIIDI AULY, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I



Dengan kursi roda ini jadi setiap pagi ibu bisa dibawa keluar agar terkena sinar matahari dan dapat menghirup udara segar. kegiatan ini bisa terus dilakukan jika ada aspirasi dari masyarakat yang sangat membutuhkan. Kami berupaya untuk terus bersama dalam melayani rakyat demi hadirnya kesejahteraan masyarakat

# Tinjau Pembangunan Jalan Tol Sukabumi, Aleg PKS: Infrastruktur **Percepat** Perekonomian Daerah

## KUTIPAN

Bogor (20/03) — Sukabumi menjadi salah satu daerah sasaran berbagai pembangun strategis nasional. Mulai dari Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), double track, bandara. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat.

“Kota Sukabumi bersiap menghadapi selesainya pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi seksi II Cigombong-Cibadak pada Agustus 2021”, ungkap Toriq pada kunjungan kerjanya meninjau pembangunan Tol Sukabumi (18/03/2021)

Politisi PKS dari dapil Jabar 11. ini mengungkapkan, berbagai paket kebijakan pusat terkait pembangunan infrastruktur di Sukabumi merupakan bagian dari pembangunan Jabar Selatan.

“Saya sangat terkesan melihat Sukabumi sebagai bagian dari Jabar Selatan yang saat ini tengah diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat, mulai dari Tol Bocimi, double trek hingga bandara,” ungkap Toriq

Namun demikian, kiranya masyarakat Sukabumi harus mempersiapkan diri agar dapat menyesuaikan dengan berbagai pembangunan strategis tersebut. Baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.

Menurutnya, Pembangunan Tol Jabar Selatan ini bisa membuat konektivitas antara ibu kota Indonesia dan ibu kota/Kabupaten khususnya Sukabumi akan semakin cepat, khususnya dari sisi percepatan ekonomi akan sangat luar biasa karena konektivitasnya berbanding lurus dengan pusat.

“Produk komoditas pertanian perkebunan terkoneksi, termasuk komoditas produk jadi hingga pergerakan jasa. Belum lagi

potensi pariwisatanya, Kabupaten Sukabumi bagaikan magnet bagi para wisatawan. Ini tentunya jadi peluang pemerintah daerah dan warga loka untuk meningkatkan sumber pendapatan, termasuk pelayanan kuliner dan perhotelan,” jelas Toriq.

Namun begitu, terdapat hal-hal yang dikhawatirkannya. ia menyebut terdapat dua aspek yang dikhawatirkan luput disinggung oleh pemerintah ketika hanya fokus pada pembangunan materi. Yakni aspek sosial budaya dan kultur.

“Seringkali kita terkesima dengan pembangunan pada suatu daerah, namun dirasakan kearifan lokalnya mulai luntur, terutama milenial. Dari ngobrol hingga ikon-ikon lokalnya kadang banyak yang tidak tahu” ungkap Toriq.

Belum lagi tentang sejarah-sejarah daerah kelahirannya, Tambahnya, kemudian gaya hidup dan lainnya. Pun demikian setelah konektivitas terjadi, pertukaran informasi dan lainya ketika konektivitas terbangun akan cepat.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**  
Anggota Komisi V DPR RI

“Saya sangat terkesan melihat Sukabumi sebagai bagian dari Jabar Selatan yang saat ini tengah diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat, mulai dari Tol Bocimi, double trek hingga bandara”

“Maka dari itu, berbagai proyek strategis ini harus diimbangi juga oleh rencana pemerintah daerah yang harus mempersiapkan berbagai hal. Termasuk kesiapan masyarakat

dalam menyambut berbagai pembangunan strategis di daerahnya agar dapat meminimalisir dampak negatif”, pungkas Toriq.

# Habib Aboe Berikan Apresiasi pada Tenaga Kesehatan sebagai Garda Terdepan Penanganan Covid-19

## KUTIPAN

Banjarmasin (19/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy memberikan apresiasi yang tinggi kepada para perawat dan tenaga medis Indonesia yang telah mengabdikan diri selama masa pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Habib Aboe Bakar Alhabsy saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Banjarmasin (19/03).

“Sikap nasionalisme sekaligus kemanusiaan banyak dijalankan para perawat dan tenaga saat menghadapi pandemi Covid-19. Apa yang mereka lakukan itu sejalan dengan nilai nilai yang ada dalam Pancasila. Mereka menjalankan tugas demi untuk kesembuhan para pasien Covid-19” jelas Anggota MPR RI dari dapil Kalsel I tersebut.

Lebih lanjut Habib menilai sikap yang diambil para perawat

dan tenaga medis ini adalah bentuk patriotisme modern.

“Para perawat dan tenaga medis harus berjibaku di tengah penyebaran virus. Bahkan mereka mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Banyak mereka yang harus mengorbankan keluarganya juga. Artinya mereka tidak bisa pulang dan menempati kos-kosan sampai berbulan. Ini adalah patriotisme modern, sesuai dengan nilai nilai di Pancasila,” terang anggota Komisi III DPR RI tersebut.

“Oleh karenanya, jangan sampai ada dari kita yang

nyinyir kepada para perawat dan tenaga medis. Apalagi ada yang mengucilkan mereka, itu tidak benar. Kita harus menghargai kerja-kerja mereka, dan mendukung apa yang telah dikerjakan,” terang pria yang kerap disapa Habib tersebut.

Disela acara tersebut Habib Aboe memberikan selamat kepada para perawat atas HUT PPNI.

“Sekalian saya ucapkan selamat HUT PPNI Ke 47, saya berikan apresiasi yang tinggi atas kinerja para perawat selama menghadapi pandemi. Semoga dengan perayaan HUT ini akan menambah semangat pelayanan yang diberikan oleh para perawat, terima kasih atas pengorbanan yang selama bangsa dan negara”, tutup Aleg dari PKS tersebut.



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

“Sikap nasionalisme sekaligus kemanusiaan banyak dijalankan para perawat dan tenaga saat menghadapi pandemi Covid-19. Apa yang mereka lakukan itu sejalan dengan nilai nilai yang ada dalam Pancasila. Mereka menjalankan tugas demi untuk kesembuhan para pasien Covid-19”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**30**  
MARET  
2021

# SELAMAT HARI FILM NASIONAL

Semoga Industri Perfilman Indonesia  
Makin Maju dan Kreatif

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI/  
Pemeran Tokoh Agama dalam  
Film Titisan Tanah Banten

# Politisi PKS: Petani Harus Punya Kapasitas Demi Menunjang Isi Tas

KUTIPAN

Sumbawa (26/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, kembali membukan Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani angkatan II & III di Grand Hotel Sumbawa Besar. (26/3)

Dalam sambutannya, politisi yang dikenal cukup konsen pada isu-isu pertanian dan ketahanan pangan itu mengajak para peserta yang hadir untuk serius mengikuti pelatihan hingga selesai.

"Petani mesti punya kapasitas. Kalau sudah demikian, nanti isi tas akan menyusul. Ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya Bimtek angkatan pertama juga kita gelar di tempat ini. Saya harap peserta serius mengikuti paparan dari para pemateri hingga selesai," kata Johan.

Petani dan penyuluh, lanjutnya, merupakan pilar penting yang perlu mendapat prioritas dalam penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian

supaya menjadi lokomotif, penggerak dan pelopor yang kreatif, inovatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global.

Jika petani dan penyuluh punya kapasitas mumpuni, maka mudah bagi kita untuk melakukan akselerasi-akselerasi dalam dunia pertanian.

"Bimtek ini merupakan langkah awal. Kedepan, apa yang kita dapatkan di ruangan ini harus bisa diimplementasikan" tambah politisi PKS itu.

Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi IV DPR RI dan Balai Ketingan itu turut juga dihadiri oleh Kepala Balai Ketingan, Ir. Sumardi Noor, juga Kadis Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin.



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

Petani mesti punya kapasitas. Kalau sudah demikian, nanti isi tas akan menyusul. Ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya Bimtek angkatan pertama juga kita gelar di tempat ini. Saya harap peserta serius mengikuti paparan dari para pemateri hingga selesai



# Kunjungan Kerja ke Dapil, Syaikhul Serahkan Bantuan kepada Satgas Covid-19

## KUTIPAN

Jakarta (19/03) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul menyerahkan bantuan kepada Satgas Covid-19. Hal itu dilakukan Syaikhul dalam Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, 12-14 Maret 2021.

Syaikhul mengatakan, bantuan ini untuk meringankan kerja-kerja sosial Tim Satgas Covid-19 di masing-masing kabupaten.

"Bantuan ini memang tidak banyak. Tapi mudah-mudahan dapat meringankan Tim Satgas Covid-19," ujar Syaikhul.

Syaikhul yang juga Presiden PKS itu mengingatkan tentang Pandemi Covid-19 yang sudah satu tahun terjadi, dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Dia mengajak semua pihak untuk mawas diri dengan cara tetap menjaga

Protokol Kesehatan Covid-19.

"Wabah ini sudah satu tahun. Kita harus tetap waspada. Jangan lengah dengan cara tetap menjaga Protokol Kesehatan Covid-19," kata Syaikhul.

Syaikhul berharap masyarakat untuk terus berempati dan bergandengan tangan dalam menghadapi pandemi ini.

"Wabah ini harus kita hadapi dengan terus berempati dan bergandengan tangan," pungkas Syaikhul.



## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Wabah ini sudah satu tahun. Kita harus tetap waspada. Jangan lengah dengan cara tetap menjaga Protokol Kesehatan Covid-19. Wabah ini harus kita hadapi dengan terus berempati dan bergandengan tangan."

# Temui Warga Dapilnya yang Berduka, Alifudin Berikan Bantuan

## KUTIPAN

Jakarta (25/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat I turun langsung saat mendapat kabar bahwa salah seorang warga dari Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan daerah pemilihannya sedang berduka cita.

Pasalnya, istri dari Donie Ardiansyah - warga Pontianak - meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani serangkaian proses pengobatan di Rumah Sakit Kanker Nasional Dharmais, Jakarta.

"Innalillahi wa Innaailahi Raajiun, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Almarhumah Mimi Syarmati. Insy Allah Almarhumah ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehah yang telah mendahului. Kami mengunjungi langsung ke keluarga Almarhumah. Selain memberikan bantuan secara finansial, kami harap dengan kehadiran kami dapat menghibur keluarga yang ditinggalkan agar dapat

mengikhlaskan kepergian Almarhumah" Ungkap Alifudin saat bertemu dengan Suami Almarhumah, Donie Ardiansyah (25/03).

Sebelumnya, keluarga meminta bantuan kepada Alifudin untuk pelayan kesehatan dan perawatan selama di Jakarta. Pasien saat itu didiagnosa mengidap kanker rektum stadium 3 dan harus dirujuk ke RS Kanker Dharmais Jakarta. Proses pengobatan telah berjalan selama kurang lebih 40 hari dari mulai kedatangan dan terus di pantau hingga akhirnya Allah SWT memanggil Almarhumah ke hadapan-Nya. Alifudin turun langsung untuk memastikan proses administrasi hingga pemulangan jenazah dapat

berjalan dengan lancar dan memastikan tiba di Pontianak tanpa kendala.

"Kami ucapkan terimakasih banyak kepada Bang Alif - panggilan akrab Alifudin - yang telah mendampingi kami dari mulai datang hingga saat istri saya dipanggil yang Maha Kuasa" tutur Donie

Salah satu program Alifudin yaitu menyediakan pelayanan pengobatan, ambulance serta rumah singgah selama berobat di Jakarta. Anggota DPR RI Komisi IX ini berusaha untuk konsisten dalam memenuhi salah satu janji politiknya saat kampanye lalu. Dengan program bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga Kalimantan Barat yang hendak melanjutkan pengobatan atau ingin berobat di Jakarta maupun di Kalimantan Barat.



## H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Innalillahi wa Innaailahi Raajiun, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Almarhumah Mimi Syarmati. Insy Allah Almarhumah ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehah yang telah mendahului. Kami mengunjungi langsung ke keluarga Almarhumah"



 Profil

- Nama Lengkap  
**Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si**
- Tempat, Tanggal Lahir  
**Pekalongan, 19 Februari 1970**
- Dapil  
**DKI Jakarta II** (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Luar Negeri)

 Pendidikan

- **SMAN 1 Pekalongan**, IPA, 1985-1988
- **S1 IKIP Semarang**, Bhs. Inggris, 1988-1992
- **S2 Univ. Indonesia** Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, 1996-1998
- **S3 Univ. Indonesia**, Ilmu Administrasi, 2008-2012

 Riwayat Organisasi

- **Anggota Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Pusat**, 1995 – sekarang
- **Sekretaris Keputrian Yayasan Alhikmah Jakarta**, 1995 – 2000
- **Sekretaris Bid.Kewanitaan DPD Partai Keadilan Jaksel**, 1999 – 2003
- **Bidang Kewanitaan DPP PKS**, 2009 – 2014
- **Sekretaris Bid. BPPN DPP PKS**, 2015 – sekarang
- **Anggota Muhammadiyah**, 2015 – sekarang
- **Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS**, 2020 – 2025

 Keluarga

- Suami : **M.Faridj Wajdi SE.Msi.**
- Anak : **2 Laki-Laki**  
**2 Perempuan**

 Riwayat Pekerjaan

- **SIT Auliyah Manajer Edukasi**, 1999-2003
- **SIT Auliyah Wakil Direktur**, 2003-2006
- **SIT Auliyah Direktur**, 2006-Sekarang
- **Anggota DPRD DKI Jakarta**, 2009-2014
- **Dosen MIA FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta**, 2015-sekarang
- **Sekprodi MIA FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta**, 2016-2019
- **Anggota DPR/MPR RI**, 2019-2024

# KURNIASIH MUFIDAYATI

 Media Sosial

-  : Kurniasih Mufidayati
-  : @mufidayati\_id
-  : @kurniasihmufidayati.id
-  : Kurniasih Mufidayati
-  : <https://kurniasihmufidayati.com/>

# Di Silatnas Kepemimpinan Daerah PKS, Anis **Sampaikan** Rendahnya Realisasi DAK 2017-2019

## KUTIPAN

Jakarta (22/03) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017-2019 dalam acara Silaturahmi Nasional Kepemimpinan Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS.

"Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional. Pada saat berbicara kesejahteraan pada tingkat daerah, maka seharusnya otonomi daerah juga diarahkan pada hal yang sama pada level daerah," ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (20/03/2021).

Lebih lanjut Anis menjelaskan bahwa ada banyak ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM, lanjut Anis, menggambarkan kondisi masyarakat dengan menggunakan tiga

dimensi dalam pengukurannya. Adapun pengukuran tersebut dilihat dari dimensi pengetahuan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagai implikasi dari program pembangunan.

"Dalam menilai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, IPM akan merujuk pada persoalan pengelolaan keuangan daerah," ungkap Anis.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Anis memaparkan bahwa salah satunya adalah pengelolaan dana perimbangan, yang dimaksud sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN.

"Dana ini diberikan untuk

mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang diharapkan semakin baik," ungkapnya.

Hal ini, imbuhnya, sejalan dengan makna yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"Dengan adanya otonomi daerah, seharusnya pemerintah daerah lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya. Termasuk dalam pengelolaan keuangan daerahnya," tutur Anis.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini menegaskan bahwa semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS

**"Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional. Pada saat berbicara kesejahteraan pada tingkat daerah, maka seharusnya otonomi daerah juga diarahkan pada hal yang sama pada level daerah"**

"Dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut," ujar Anis.

Sementara itu, kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangu-

nan daerah, dimana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dapat menunjukkan kontribusi yang besar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

"Kedua hal tersebut merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Sidang Offline Habib Rizieq

# HNW: Apresiasi Semua Pihak yang Sukseskan, Demi Tegaknya Hukum

**KUTIPAN**

Jakarta (25/03) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, kembali mengapresiasi sikap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur

dalam perkara terdakwa Habib Rizieq Shihab yang akhirnya mengedepankan tuntutan keadilan dengan mengabulkan permohonan kuasa hukum untuk menggelar sidang secara offline tersebut, dan bukan lagi secara online seperti sebelumnya.

Hidayat berharap sikap berorientasi menegakkan keadilan hukum oleh majelis tersebut dapat sukses, dan terus berlanjut terhadap pokok perkara terkait kasus kerumunan tersebut. Juga untuk kasus-kasus lain yang dirasakan adanya ketidakadilan hukum, seperti kasus yg ditimpakan kepada Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) dan pimpinan FPI yang lain.

Harapan tersebut disampaikan menjelang persidangan offline pertama

dalam kasus Habib Rizieq, sesuai penetapan hakim, yang akan dilaksanakan pada besok, Jumat (26/03/2021).

"Penetapan majelis hakim yang akhirnya membolehkan sidang secara langsung atau offline tersebut, menunjukkan majelis hakim masih mempertimbangkan tuntutan hati nurani dan keadilan hukum, tidak hanya mengikuti jaksa penuntut umum, tetapi juga mendengarkan argumentasi legal dan logis dari Habib Rizieq dan kuasa hukumnya. Sikap adil ini perlu diapresiasi dan didukung, agar jadi preseden yang baik, dan agar hakim dapat memutuskan pokok perkaranya secara benar dan adil. Juga untuk kasus-kasus yang lainnya," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (25/03).

HNW sapaan akrabnya menilai penetapan majelis hakim agar sidang dilakukan secara langsung atau offline menunjukkan bahwa prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, yakni proses hukum yang adil dan tidak memihak, tidak tebang pilih, layak, serta telah melalui mekanisme dan prosedur hukum yang ada untuk memperoleh keadilan substantif dapat dipenuhi.

"Prinsip *due process of law* dan *equality before the law* ini merupakan salah satu syarat terbentuknya negara hukum, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945," tukasnya.

Selain itu, HNW mengingatkan meski Habib Rizieq dan Pimpinan FPI yang lain berstatus sebagai terdakwa, hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia masih tetap melekat. Salah satu hak konstitusional yang dimilikinya, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

"Sikap adil ini perlu diapresiasi dan didukung, agar jadi preseden yang baik, dan agar hakim dapat memutuskan pokok perkaranya secara benar dan adil. Juga untuk kasus-kasus yang lainnya"

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar semua pihak, baik penuntut umum dan Habib Rizieq beserta kuasa hukum dan para pendukungnya dapat sama-sama mengormati penetapan majelis hakim ini

dengan menjaga proses persidangan supaya berlangsung secara kondusif. Apalagi, Habib Rizieq juga sudah menyampaikan seruan kepada para pengikut dan pendukungnya agar mereka tidak berkerumun datang ke Pengadilan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Pesan Presiden PKS di Tugu 0 Kilometer Pangkalpinang

## KUTIPAN

Pangkalpinang (25/03) --- Presiden PKS Ahmad Syaikhmu berkunjung ke Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rabu, (24/3).

Dalam kesempatan itu, Syaikhmu datang ke Tugu 0 Kilometer yang menjadi ikon baru Kota Pangkalpinang, Ibukota Babel.

Syaikhmu memuji kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Walikota Pangkalpinang.

"Saya apresiasi kepada Walikota Pangkalpinang yang memiliki inovasi dan kreativitas menjadikan monumen 0 kilometer yang lebih representatif. Sebelumnya titik 0 kilometer hanya ditandai dengan patok beton, alhamdulillah sekarang sudah lebih ikonik," ujar Syaikhmu.

Di samping itu, koin yang dijadikan lambang di titik 0

kilometer adalah koin yang dibuat pada tahun 1820 M di Babel. Ini menunjukkan pada saat itu Babel sudah melakukan transaksi ekonomi.

"Kalau pada abad 19 saja, Bangka Belitung sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, seharusnya ini bisa terus ditingkatkan sehingga menjadi lebih maju."

Koin ini juga melambangkan persatuan di Babel. Satu sisi koin bertuliskan Arab, dan satu sisi lainnya bertuliskan Cina. Etnis, bagi warga Babel bukan menjadi masalah.

"Tong ngin fan ngin jit jang" yang artinya Cina dan Melayu, sama saja," kata Syaikhmu mengutip pernyataan Walikota Pangkalpinang.

Persatuan antar etnis membuat kondisi keamanan terjaga.

"Ini sangat kondusif untuk kemajuan perekonomian daerah," ujar Syaikhmu.



**H. AHMAD SYAIKHMU**  
Anggota Komisi I DPR RI

Saya apresiasi kepada Walikota Pangkalpinang yang memiliki inovasi dan kreativitas menjadikan monumen 0 kilometer yang lebih representatif. Sebelumnya titik 0 kilometer hanya ditandai dengan patok beton, alhamdulillah sekarang sudah lebih ikonik"





**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***